

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai, sebagaimana yang termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Pembangunan ekonomi pada dasarnya adalah usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat terutama di bidang materiil. Dengan demikian diharapkan kegiatan masyarakat akan berkembang dan terjadi perubahan-perubahan dalam segala bidang kehidupan. Pembangunan ekonomi dilaksanakan sesuai dengan Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 amandemen keempat, yaitu perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 amandemen keempat antara lain menyatakan

bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang. Bentuk perusahaan yang sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 amandemen keempat ialah koperasi, karena pengertian koperasi di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Kegiatan koperasi untuk meningkatkan modal usaha para anggotanya adalah melalui kegiatan usaha simpan pinjam sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyatakan bahwa koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota dan calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya, yang diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

Kegiatan usaha simpan pinjam yang dilaksanakan oleh Koperasi sebagaimana diuraikan di dalam Ketentuan Umum Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi memiliki karakter khas, yaitu merupakan usaha yang

banyak menanggung risiko dan didasarkan pada kepercayaan atau lebih dikenal dengan pemberian pinjaman. Pemberian pinjaman oleh koperasi dituangkan dalam suatu perjanjian atau akad pemberian pinjaman. Perjanjian Pinjaman Uang terbentuk karena adanya persesuaian pernyataan kehendak sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1320 angka 1 KUHPerdara mengenai salah satu syarat sahnya perjanjian, yaitu kesepakatan atau persetujuan mereka yang mengikatkan dirinya. (*de toestemming van degenen die zich verbinden*). Oleh karena itu, pada umumnya suatu Perjanjian Pinjaman Uang dimulai dengan pernyataan dari salah satu pihak untuk mengikatkan dirinya atau menawarkan suatu perjanjian atau disebut penawaran (*aanbod*). Kemudian pihak lainnya juga memberikan pernyataan penerimaan penawaran tersebut atau disebut penerimaan (*aanvaarding*).¹

Asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUHPerdara melandasi lahirnya suatu perjanjian di mana setiap orang bebas membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas membuat perjanjian dalam bentuk dan isinya, serta setiap orang bebas membuat perjanjian dengan siapapun. Akan tetapi kebebasan pihak-pihak dalam perjanjian

¹ Johannes Ibrahim, *Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) dan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Bank*, (Bandung : CV. Utomo, 2003), halaman 49.

dibatasi oleh undang-undang, kesusilaan baik dan ketertiban umum, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1337 KUH Perdata.²

Perjanjian Pinjaman Uang pada koperasi dibuat dalam bentuk baku atau disebut dengan standar kontrak, sebagaimana pengertian standar kontrak adalah perjanjian yang telah ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir dan isi perjanjiannya telah ditentukan secara sepihak oleh salah satu pihak yaitu biasanya oleh pihak yang posisi ekonominya lebih kuat kepada pihak yang posisi ekonominya lebih lemah.³

Perjanjian baku harus memperhatikan pelaksanaan asas kebebasan berkontrak, karena dalam suatu perjanjian baku kedudukan para pihak dalam perjanjian tidak seimbang, yaitu satu pihak pada posisi kuat dan pihak lainnya pada posisi lemah. Kedudukan para pihak yang tidak seimbang menyebabkan pihak yang posisi ekonominya lemah menjadi tidak mempunyai pilihan lain kecuali menerima atau menolak perjanjian tersebut (*take it or leave it*).⁴ Perjanjian baku ada yang mencantumkan klausul eksonerasi (*exemption clause*), sebagaimana yang dikemukakan oleh Mariam Darus Badruzaman dalam Celina Tri Siwi Kristiyanti, dengan istilahnya klausul eksonerasi sebagai klausul yang berisi pembatasan

² Komariyah, *Hukum Perdata*, (Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2002), halaman 180-181.

³ Salim HS., *Hukum Kontrak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), halaman 107.

⁴ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), halaman 140.

pertanggungjawaban dari kreditor, terhadap risiko dan kelalaian yang mesti ditanggungnya.⁵ Klausul eksonerasi misalnya apabila kita mencetakkan foto di tukang foto, mencuci pakaian di tukang binatu, kalau foto atau pakaian tersebut tidak diambil selama 3 bulan maka tukang foto atau binatu tidak bertanggung jawab atas foto yang dicetak atau pakaian yang dicucikan. Demikian pula kalau kita bepergian naik bis, di dalam bis akan tercantum kata-kata : “Kerusakan barang, ditanggung oleh penumpang sendiri.” Terhadap jual beli barang di toko maka tanda terima pembayaran dibubuhi syarat bahwa : “Barang yang telah dibeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar” .⁶ Di dalam perjanjian kredit bank, ada ketentuan yang memberikan hak kepada bank untuk tanpa ada alasan apapun juga menghentikan, baik untuk sementara maupun untuk selanjutnya, izin tarik kredit oleh nasabah debitor, adalah tentu saja merupakan ketentuan yang sangat memberatkan bagi nasabah debitor, sekalipun ketentuan itu tidak merupakan ketentuan yang membebaskan atau membatasi tanggung jawab bank terhadap gugatan nasabah debitor. Klausul yang berbunyi demikian itu tetap saja berarti bank tidak mungkin dapat dimintai tanggung jawab atas tindakannya yang berupa menolak penggunaan

⁵ *Ibid.*, halaman 141.

⁶ Purwahid Patrik, *Asas Itikad Baik Dan Kepatutan Dalam Perjanjian*, (Semarang : Penerbit UNDIP, 1986), halaman 38-39.

selanjutnya atas kredit itu oleh nasabah debitor tanpa perlu ada alasan untuk itu.⁷

Perjanjian pinjaman uang dalam pelaksanaannya terdapat kemungkinan terjadinya tindakan ingkar janji atau tidak melaksanakan perjanjian yang telah diperjanjikan para pihak, yang disebut dengan *wanprestasi*, yaitu seorang debitor tidak melaksanakan perjanjian adalah karena kesalahannya. Akibat hukum *wanprestasi* dapat berupa membayar kerugian pinjaman kreditor atau yang disebut dengan membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian, peralihan risiko, dan dapat juga dengan membayar biaya perkara apabila sampai diperkarakan ke pengadilan.⁸

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul :
“PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAMAN UANG PADA KOPERASI NUSA INDAH KENDAL”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan asas kebebasan berkontrak pada perjanjian baku dalam Perjanjian Pinjaman Uang pada Koperasi Nusa Indah Kendal?

⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, (Jakarta : Institut Bankir Indonesia, 1993), halaman 77.

⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : PT. Intermasa, 1991), halaman 45.

2. Bagaimanakah penyelesaiannya jika Debitor Koperasi Nusa Indah Kendal Wanprestasi?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mempunyai tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan asas kebebasan berkontrak dalam pembuatan Perjanjian Pinjaman Uang pada Koperasi Nusa Indah Kendal
2. Untuk mengetahui penyelesaiannya jika Debitor Koperasi Nusa Indah Kendal melakukan Wanprestasi

D. Manfaat Penelitian

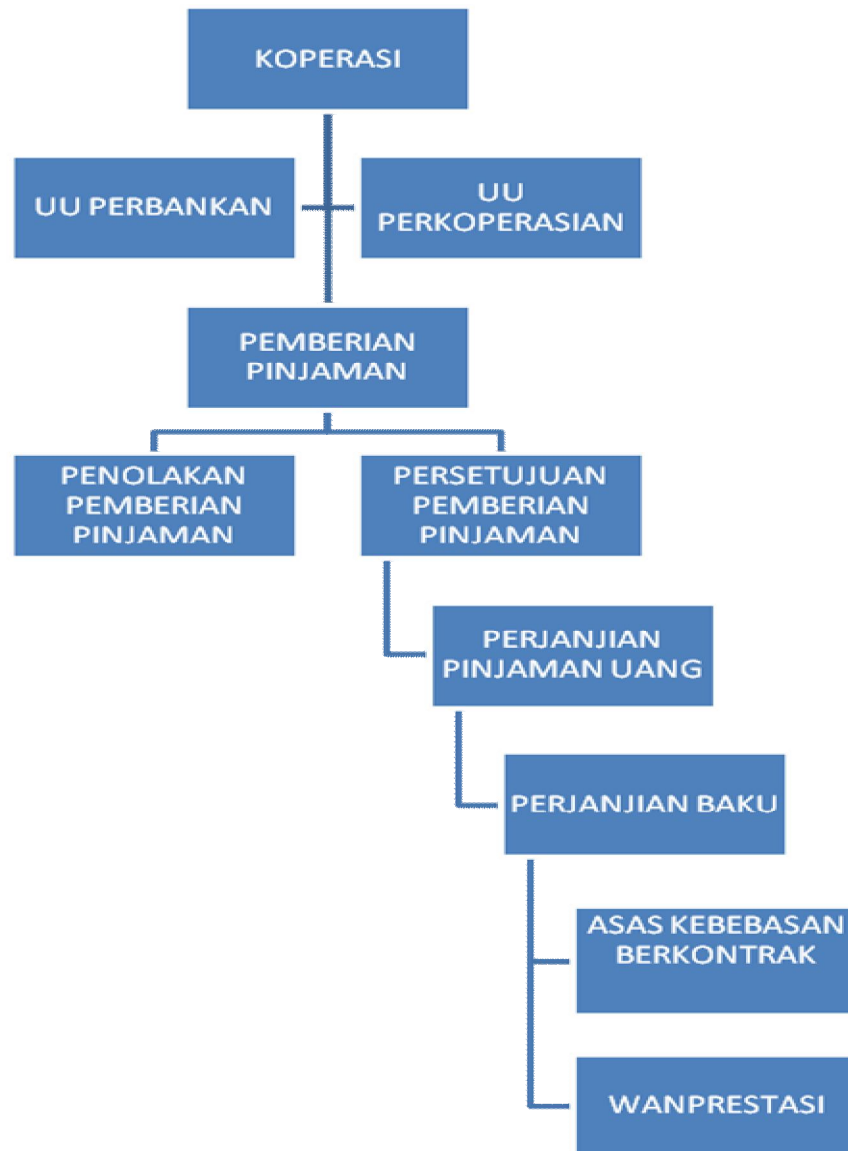
1. Manfaat praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat berfaedah bagi masyarakat dan koperasi, tentang pelaksanaan perjanjian baku dalam Perjanjian Pinjaman Uang pada Koperasi Nusa Indah Kendal

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini penulis harapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan di bidang Ilmu Hukum khususnya Hukum Perdata tentang pelaksanaan perjanjian baku dalam Perjanjian Pinjaman Uang pada Koperasi Nusa Indah Kendal, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.

E. Kerangka Pemikiran



Manusia adalah *Homo economicus* dan setiap manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan manusia yang beraneka ragam sesuai dengan harkatnya selalu meningkat, sedangkan kemampuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkannya

itu terbatas. Hal ini menyebabkan manusia memerlukan bantuan untuk memenuhi hasrat dan cita-citanya, dalam hal ia berusaha, maka untuk meningkatkan usahanya atau untuk meningkatkan daya guna sesuatu barang, ia memerlukan bantuan dalam bentuk permodalan. Bantuan dalam bentuk tambahan modal inilah yang sering disebut dengan pinjaman atau pemberian pinjaman.⁹

Pengertian pinjaman berdasarkan pasal 1 ayat 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi adalah “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Koperasi dengan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan.”

Dasar pemberian pinjaman ialah kepercayaan. Seseorang atau suatu badan yang memberikan pinjaman percaya bahwa penerima pinjaman di masa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan. Apa yang telah diperjanjikan itu dapat berupa barang, uang, atau jasa.¹⁰

Koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan

⁹ Thomas Suyatno, dkk., *Dasar-Dasar Perkreditan*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007), halaman 13

¹⁰ *Ibid.*, halaman 12.

kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan, dalam memberikan pinjaman berdasarkan ketentuan umum penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi adalah harus diatur secara khusus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perkoperasian.

Pemberian pinjaman yang dilakukan koperasi, berdasarkan Pasal 19 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi wajib memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pemberian pinjaman, disertai pelaksanaan prinsip kesehatan dan prinsip kehati-hatian, untuk memberikan pedoman dalam pemberian pinjaman yang dilakukan oleh koperasi dalam menjaga kesehatan usahanya. Penjelasan Pasal 19 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi menguraikan tentang pengertian asas pemberian pinjaman yang sehat adalah sebagai pemberian pinjaman yang di dasarkan atas penilaian kelayakan dan kemampuan permohonan pinjaman. Ketentuan tentang prinsip kesehatan dan prinsip kehati-hatian yang ditetapkan oleh Menteri dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi usaha

pemberian pinjaman yang dilakukan oleh koperasi dalam menjaga kesehatan usahanya, karena usaha pemberian pinjaman merupakan sarana pengelolaan dana.

Pemberian pinjaman dimulai dengan pengajuan permohonan pemberian pinjaman kepada koperasi oleh anggota atau calon anggota koperasi. Permohonan pemberian pinjaman yang diterima oleh koperasi dilanjutkan dengan dilakukannya penyidikan dan analisis pemberian pinjaman untuk mendapatkan bahan pertimbangan sebagai pengambilan keputusan pimpinan atas permohonan pemberian pinjaman. Keputusan permohonan pemberian pinjaman dapat berupa penolakan atau persetujuan permohonan pemberian pinjaman yang dilanjutkan dengan pencairan pemberian pinjaman.¹¹

Apabila permohonan pemberian pinjaman disetujui, maka nasabah mempunyai kewajiban menandatangani surat Perjanjian Pinjaman Uang, yang diikuti dengan pengikatan jaminan pemberian pinjaman, karena pemberian pinjaman yang diberikan koperasi mengandung risiko dan koperasi harus melaksanakan prinsip pemberian pinjaman yang sehat. Untuk mengurangi risiko pemberian pinjaman oleh koperasi, maka keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang

¹¹ *Ibid.*, halaman 69.

diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh koperasi.¹²

Perjanjian Pinjaman Uang dibuat dengan jumlah minimal dalam rangkap 4, yaitu asli untuk koperasi (cabang), lembar kedua untuk nasabah, lembar ketiga untuk kantor pusat, dan lembar keempat untuk berkas atas nama nasabah.¹³ Sebelum penandatanganan Perjanjian Pinjaman Uang, dilakukan review isi perjanjian, yang diperlukan karena :

1. Dalam setiap pembuatan draft pemberian pinjaman baik di bawah tangan maupun oleh notaris, akan selalu terdapat kemungkinan adanya kesalahan
2. Bahwa apabila terhadap isi perjanjian, baik karena tulisan maupun materinya, oleh nasabah dapat saja diajukan alasan dalam perselisihan nantinya.¹⁴

Perjanjian Pinjaman Uang yang telah disetujui dan disepakati pemohon pemberian pinjaman wajib dituangkan dalam Perjanjian Pinjaman Uang secara tertulis. Pembuatan Perjanjian Pinjaman Uang dalam bentuk tertulis tidak diatur secara jelas di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, sehingga

¹² *Ibid.*, halaman 81.

¹³ *Ibid.*, halaman 82.

¹⁴ H.R. Daeng Naja, *Kukum Kredit Dan Bank Garansi (The Bankers Hand Book)*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005), halaman 196-197.

pembuatan Perjanjian Pinjaman Uang secara tertulis adalah berdasarkan penafsiran di dalam penjelasan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, tentang adanya kewajiban penandatanganan oleh sekurang-kurangnya ketua dan sekretaris masing-masing koperasi, untuk sahnyanya perjanjian kerjasama koperasi dengan koperasi lain dan atau anggotanya. Dengan adanya penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut, mengandung makna bahwa perjanjian kerjasama koperasi dengan koperasi dan atau anggotanya dibuat dalam bentuk tertulis, sehingga pembuatan Perjanjian Pinjaman Uang dalam bentuk tertulis yang telah dilaksanakan berdasarkan kebiasaan di lingkungan koperasi dapat kita tafsirkan dari ketentuan penjelasan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi tersebut.

Jenis Perjanjian Pinjaman Uang ada 2, yaitu :

1. Perjanjian Pinjaman Uang yang dibuat di bawah tangan/akta di bawah tangan, yaitu perjanjian pemberian pinjaman oleh koperasi kepada nasabahnya yang hanya dibuat diantara mereka (kreditor dan nasabah) tanpa notaris

2. Perjanjian Pinjaman Uang yang dibuat dihadapan notaris/akta otentik, yaitu perjanjian pemberian pinjaman oleh koperasi kepada nasabahnya yang hanya dibuat oleh/dihadapan notaris¹⁵

Perjanjian Pinjaman Uang memuat serangkaian klausula atau *covenant*, yang sebagian besar dari klausula tersebut merupakan upaya untuk melindungi pihak pemberi pinjaman dalam pemberian pinjaman. Klausula merupakan serangkaian persyaratan yang diformulasikan dalam upaya pemberian pinjaman ditinjau dari aspek finansial dan hukum. Dari aspek finansial, klausula melindungi kreditor agar dapat menuntut atau menarik kembali dana yang telah diberikan kepada nasabah dalam posisi yang menguntungkan bagi pinjaman kreditor bila kondisi nasabah tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Sedangkan dari aspek hukum, klausula merupakan sarana untuk melakukan penegakan hukum agar nasabah dapat memenuhi substansi yang telah disepakati di dalam Perjanjian Pinjaman Uang.¹⁶

Perjanjian Pinjaman Uang dibuat dalam bentuk baku atau standar karena hampir seluruh klausula-klausulanya dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Adapun yang belum dibakukan hanya beberapa hal, misalnya yang menyangkut

¹⁵ H.R. Daeng Naja, *Op.cit.*, halaman 183-184.

¹⁶ Johanes Ibrahim, *Op.cit.*, halaman 58-59.

jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu, dan beberapa hal yang spesifik dari objek yang diperjanjikan.¹⁷

Perjanjian baku isinya dibuat secara sepihak, dalam arti salah satu pihak telah menentukan isi dan bentuk perjanjian pada satu bentuk pembuatannya, sehingga dapat dikatakan bahwa dalam perjanjian baku kedudukan para pihak dalam perjanjian tidak seimbang, yaitu satu pihak pada posisi kuat dan pihak lainnya pada posisi lemah. Kedudukan para pihak yang tidak seimbang menyebabkan pihak yang posisi ekonominya lemah menjadi tidak mempunyai pilihan lain kecuali menerima atau menolak perjanjian tersebut (*take it or leave it*).¹⁸

Perjanjian Pinjaman Uang berlandaskan asas kebebasan berkontrak antara nasabah dengan koperasi. Asas kebebasan berkontrak (*partij otonomi*) yang terdapat di dalam Pasal 1338 KUHPerdata menentukan bahwa setiap orang bebas membuat perjanjian, baik yang terdapat dalam KUH Perdata (perjanjian bernama/*benoemd/nominaat*) maupun yang tidak terdapat di dalam KUH Perdata (perjanjian tidak bernama/*onbenoemde overeenkomst/innominaat*), setiap orang bebas membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas membuat perjanjian dalam bentuk dan isinya, serta setiap orang bebas membuat perjanjian dengan siapapun. Akan tetapi kebebasan pihak-pihak dalam perjanjian dibatasi oleh

¹⁷ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op.cit.*, halaman 139.

¹⁸ *Ibid.*, halaman 140.

undang-undang, kesusilaan baik dan ketertiban umum, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1337 KUH Perdata.¹⁹

Perjanjian pinjaman uang dalam pelaksanaannya terdapat kemungkinan terjadinya tindakan ingkar janji atau tidak melaksanakan perjanjian yang telah diperjanjikan para pihak, yang disebut dengan *wanprestasi*, yaitu seorang debitor tidak melaksanakan perjanjian adalah karena kesalahannya. Akibat hukum *wanprestasi* dapat berupa membayar kerugian pinjaman kreditor atau yang disebut dengan membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian, peralihan risiko, dan dapat juga dengan membayar biaya perkara apabila sampai diperkarakan ke pengadilan.²⁰

Kelengkapan dan kebenaran surat Perjanjian Pinjaman Uang harus diteliti oleh pejabat yang berwenang. Pejabat yang melakukan penelitian dan pemeriksaan tersebut harus membubuhkan parafnya.²¹

F. Metode Penelitian

Ilmu pengetahuan pada hakekatnya lahir karena adanya hasrat ingin tahu dalam diri manusia, yang timbul karena banyak hal-hal atau aspek-aspek kehidupan yang masih gelap bagi manusia, sehingga manusia tergerak untuk mencari kebenaran atas suatu kegelapan tersebut. Jika manusia memperoleh pengetahuan tentang sesuatu, maka kepuasannya akan disusul oleh keingintahuan yang

¹⁹ Komariyah, *Op.cit.*, halaman 179-181.

²⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : PT. Intermasa, 1991), halaman 45.

²¹ Thomas Suyatno, *Op.cit.*, halaman 82.

lebih mendalam lagi,²² yang kemudian akan beranjak pada keingintahuan ilmiah. Ilmu mencoba mencari penjelasan dengan mempelajari permasalahan yang muncul. Sedangkan permasalahan dijawab oleh pengetahuan yang dikumpulkan oleh ilmu.²³ Dapat dikatakan bahwa ilmu mempunyai peranan yang penting dalam menjawab keingintahuan manusia sebagaimana dikatakan V. A. Tan dalam Bambang Sunggono, bahwa ilmu tidak hanya himpunan pengetahuan yang sistematis, tetapi juga merupakan suatu metodologi, sehingga tanpa ilmu maka keinginan manusia hanya sebagai kebutuhan saja.²⁴

Dalam mendapatkan fakta dan prinsip-prinsip atas keingintahuannya, maka manusia harus melakukan suatu penyelidikan secara sabar dan hati-hati terhadap suatu bidang ilmu. Kegiatan penyelidikan ini disebut dengan penelitian atau riset. Sedangkan pengertian penelitian menurut Hillway merupakan suatu metode studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan secara hati-hati dan sempurna atas suatu permasalahan, sehingga dengan kegiatan penyelidikan itu dapat diperoleh pemecahan yang tepat terhadap permasalahan yang ada.²⁵ Dari pengertian tersebut maka suatu

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI-PRESS, 1984), halaman 1.

²³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), halaman 25.

²⁴ *Ibid.*, halaman 27.

²⁵ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2003), halaman 1.

penelitian merupakan sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Penelitian tidak dapat dipisahkan dari ilmu pengetahuan, demikian juga sebaliknya.²⁶

Kegiatan penelitian dimulai oleh seorang ilmuwan dengan melakukan usaha untuk bergerak dari teori yang merupakan sistem yang berisikan proposisi-proposisi yang telah diuji kebenarannya, kepada pemilihan metode. Metodologi merupakan pedoman tentang cara-cara ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang dihadapi.²⁷ Setiap ilmu pengetahuan mempunyai identitas tersendiri, sehingga metodologi yang diterapkan disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Demikian juga dalam ilmu hukum, penelitian yang dilakukan juga menggunakan metodologi tersendiri yang berbeda dari ilmu pengetahuan yang lain.²⁸

Di dalam ilmu hukum, penelitian yang dilakukan disebut dengan penelitian hukum. Soerjono Soekanto memberikan definisi tentang penelitian hukum sebagai berikut :

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.²⁹

²⁶ Soerjono Soekanto, *Op. cit.*, halaman 5.

²⁷ *Ibid.*, halaman 6.

²⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), halaman 9.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, halaman 43.

Suatu aktivitas tidak dapat dilepaskan dari suatu kegiatan. Aktivitas-aktivitas seorang peneliti hukum dalam penelitian hukum, dilakukan untuk mengungkapkan kebenaran atas suatu keingintahuan yang muncul dari hasrat ingin tahu manusia dengan terencana, yaitu secara metodologis, sistematis dan konsisten, maupun penelitian hukum tersebut dilakukan secara kebetulan yaitu dengan berdasarkan pada keadaan atau metode untung-untungan (*trial and error*) yang sering mengabaikan metode dan sistematika, serta tidak didasarkan pada pemikiran yang mantap.³⁰

Oleh karena itu agar dalam penelitian hukum yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman Uang pada Koperasi Nusa Indah Kendal” dapat memperoleh kebenaran atau jawaban atas permasalahan yang diambil, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis empiris, yaitu suatu metode pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian di lapangan.³¹ Penggunaan metode pendekatan tersebut dikarenakan dalam penelitian ini penulis mengaitkan hukum kepada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang kongkrit dalam masyarakat (yuridis empiris) yang

³⁰ Bambang Sunggono, *Op.cit.*, halaman 39-40.

³¹ Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, halaman 52.

berupa data primer, yaitu dengan mengkaji data yang penulis peroleh dalam penelitian di lapangan.³²

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan masalah hukum, sistem hukum dan mengkajinya atau menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan dari penelitian bersangkutan.

3. Sumber Dan Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui observasi/pengamatan, interview/wawancara, questioner/angket.³³ Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan, dengan menelaah buku-buku literatur, undang-undang, brosur/tulisan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.³⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data penulis lakukan dengan mengadakan studi kepustakaan dan studi lapangan, yaitu :

- a. Studi kepustakaan, merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh data awal yang akan dipergunakan dalam penelitian lapangan. Data yang diteliti dapat berwujud data yang

³² Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.cit.*, hal. 9.

³³ *Ibid.*, halaman 10.

³⁴ *Ibid.*, halaman 11.

diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan (data sekunder) dan/atau secara langsung dari masyarakat (data primer). Data sekunder di bidang hukum dapat terdiri atas tiga macam, yang terdiri atas : bahan hukum primer, yang merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti dalam penelitian ini penulis menggunakan KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dan Perjanjian Pinjaman Uang; bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dan dapat membantu dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti buku-buku yang berkaitan dengan judul tesis yang penulis angkat; dan yang terakhir adalah dengan menggunakan bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan informasi atau penjelasan bagi bahan hukum primer dan sekunder.³⁵

- b. Studi lapangan dengan melakukan wawancara, yaitu cara pengumpulan data untuk memperoleh informasi, yang penulis lakukan dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.³⁶ Di dalam wawancara dapat dipergunakan pedoman wawancara yang berisikan pokok-pokok yang diperlukan maupun dengan menggunakan daftar pertanyaan yang terstruktur. Daftar pertanyaan tersebut bersifat tertutup dan terbuka, yaitu dengan

³⁵ *Ibid.*, halaman 52-53.

³⁶ *Ibid.*, halaman 57.

menyediakan jawaban yang dapat dipilih oleh responden dan juga menyediakan pertanyaan yang dapat diperoleh jawaban lebih luas dan mendalam.³⁷ Dalam penelitian ini penulis menggunakan daftar pertanyaan yang bersifat terbuka, karena responden diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban yang lebih luas dan mendalam atas pertanyaan yang diajukan penulis. Wawancara penulis lakukan terhadap :

- 1). Manager Koperasi Nusa Indah Kendal
- 2). 3 (tiga) orang nasabah Koperasi Nusa Indah Kendal

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian dianalisa secara kualitatif, yaitu dengan menggunakan data yang diperoleh dari penelitian lapangan yang tidak berbentuk angka,³⁸ yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Op. cit.*, halaman 25-26.

³⁸ J. Supranto, *Op. cit.*, halaman 2.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian

1. Pengertian Dan Pengaturan Perjanjian

Istilah Perjanjian dalam Bahasa Belanda disebut dengan *Overeenkomst* dan dalam Bahasa Inggris adalah *contract*,³⁹ namun para sarjana ada yang mengartikan *Overeenkomst* sebagai perjanjian dan ada pula yang menyebutnya sebagai persetujuan. Sedangkan kata perjanjian dan kontrak menurut Buku III Bab II KUH Perdata adalah sama sebagaimana penyebutannya yang menunjukkan bahwa pembuat undang-undang menganggap kedua istilah tersebut mempunyai arti yang sama.⁴⁰

Definisi perjanjian dalam KUH Perdata terdapat dalam pasal 1313 yang berbunyi :

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”

Definisi perjanjian di dalam pasal 1313 KUH Perdata tersebut menurut para sarjana Hukum Perdata mengandung 4 kelemahan yaitu :

a. Pengertian perjanjian terlalu luas

³⁹ Salim H.S., *Hukum Kontrak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), halaman 25.

⁴⁰ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Bandung : Mandar Maju, 2000), halaman 23.

- b. Perjanjian tersebut hanya menyangkut perjanjian sepihak saja
- c. Kata perbuatan mencakup juga perbuatan tanpa konsensus/kesepakatan
- d. Perumusan perjanjian dalam pasal 1313 KUH Perdata tersebut tanpa menyebut tujuan dilakukannya perjanjian.⁴¹

Berdasarkan hal tersebut maka pengertian perjanjian menurut Wirjono Prodjodikoro dirumuskan menjadi suatu hubungan hukum mengenai harta benda yang dilakukan oleh dua pihak, dimana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak yang lainnya berhak menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut.⁴²

2. Unsur-Unsur Perjanjian

Dari uraian tentang perjanjian tersebut, Abdulkadir Muhammad menyimpulkan adanya 6 unsur perjanjian, yaitu :

- a. Adanya pihak-pihak yang disebut subyek perjanjian, dapat berupa manusia pribadi dan badan hukum. Subyek hukum ini harus mampu atau wenang berbuat hukum, sesuai ketentuan undang-undang.
- b. Adanya persetujuan antara pihak-pihak mengenai syarat-syarat dan objek perjanjian.

⁴¹ Achmad Busro, *Catatan Kuliah Hukum Perdata II, Hukum Perikatan, Jilid I*, (Semarang : Perc. Oetama, 1985), halaman 1-2.

⁴² Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, (Bandung : Mandar Maju, 2000), halaman 4.

- c. Adanya tujuan yang hendak dicapai, yaitu terutama untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak, dimana tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan baik, dan ketertiban umum.
- d. Adanya prestasi yang akan dilaksanakan, yang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.
- e. Adanya bentuk tertentu yang perlu ditentukan, kerana hanya dengan bentuk tertentu (akta)/tertulis suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan kekuatan bukti, meskipun suatu perjanjian dapat dibuat secara lisan.
- f. Adanya syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian, sehingga dapat diketahui hak dan kewajiban pihak-pihak. Syarat-syarat ini terdiri atas syarat pokok yang akan menimbulkan hak dan kewajiban pokok, misalnya harganya, dan juga syarat pelengkap atau tambahan, misalnya mengenai cara pembayarannya.⁴³

Unsur-unsur perjanjian menurut R. Setiawan terdiri atas :

- a. Unsur essentialia, merupakan unsur yang sangat penting dalam perjanjian, karena tanpa unsur tersebut perjanjian tidak mungkin ada. Misalnya harga dan barang merupakan unsur essentialia dalam jual beli.

⁴³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung : Alumni, 1985), halaman 79-81.

- b. Unsur *naturalia*, adalah unsur yang oleh undang-undang ditentukan sebagai peraturan-peraturan yang bersifat mengatur, yang sewajarnya ada jika tidak dikesampingkan para pihak dalam perjanjian. Misalnya dalam jual beli barang berdasarkan pasal 1474 KUH Perdata, seorang penjual wajib menjamin cacat tersembunyi, namun ketentuan tersebut dapat dikesampingkan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- c. Unsur *accidentalia*, yaitu unsur yang ditambahkan dalam perjanjian oleh para pihak, dimana undang-undang tidak mengaturnya. Misalnya dalam jual beli rumah beserta alat-alat rumah tangganya.⁴⁴

3. Asas-Asas Hukum Perjanjian

Asas hukum merupakan unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum, karena merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum. Pengertian asas hukum tersebut mengandung makna bahwa suatu peraturan hukum bisa dikembalikan kepada asas-asas hukumnya, sehingga asas hukum merupakan alasan bagi lahirnya peraturan hukum. Sebagaimana pendapat Paton bahwa asas hukum akan tetap ada dan melahirkan peraturan-peraturan hukum baru, dan dapat membuat hukum selalu tumbuh, hidup, dan berkembang.⁴⁵

⁴⁴ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung : Binacipta, 1987), halaman 50.

⁴⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), halaman 45.

Sebagaimana pengertian asas hukum diatas, maka peraturan hukum perdata khususnya hukum perjanjian juga mempunyai asas-asas hukum, yang melandasi lahirnya hukum perjanjian tersebut. Ada lima asas hukum perjanjian, yang meliputi :

- a. Asas konsensualitas, yang berarti bahwa dengan tercapainya kata sepakat antara kedua belah pihak, perjanjian yang dibuat telah mengikat para pihak tersebut. Asas konsensualitas dapat disimpulkan dari pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu persetujuan yang dibuat secara sah akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, dimana ketentuan tersebut menunjuk pada ketentuan tentang syarat sahnya perjanjian yang pertama dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian. Terdapat pengecualian terhadap asas konsensualitas, yaitu terhadap perjanjian yang harus dituangkan dalam bentuk riil, dimana lahirnya perjanjian tersebut pada saat diserahkannya objek perjanjian.

Pengecualian ini misalnya dalam :

- 1) Perjanjian penitipan barang yang terdapat dalam pasal 1694 KUH Perdata
- 2) Perjanjian pinjam pakai yang terdapat dalam pasal 1740 KUH perdata

- 3) Perjanjian pinjam pakai sampai habis yang terdapat dalam pasal 1754 KUH Perdata.⁴⁶

Berdasarkan saat terjadinya perjanjian, yaitu sejak tercapai kata sepakat diantara para pihak, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian tersebut dapat dibuat secara lisan ataupun dalam bentuk tertulis yang berupa akta jika dikehendaki sebagai alat bukti, karena undang-undang tidak mewajibkan formalitas bentuk perjanjian yang dibuat. Namun demikian ada perjanjian yang harus dibuat dalam bentuk tertulis, sehingga terhadap asas konsensualitas ini terdapat pengecualian lagi selain yang telah disebutkan di atas, yaitu terhadap:

- 1) Perjanjian perdamaian
- 2) Perjanjian penghibahan
- 3) Perjanjian pertanggungan⁴⁷

- b. Asas kebebasan berkontrak (*partij otonomi*), yaitu bahwa setiap orang bebas membuat perjanjian, baik yang terdapat dalam KUH Perdata (perjanjian bernama/*benoemd/nominaat*) maupun yang tidak terdapat di dalam KUH Perdata (perjanjian tidak bernama/*onbenoemde overeenkomst/innominaat*). Asas kebebasan berkontrak disimpulkan dari ketentuan pasal 1338 KUH Perdata, yaitu :

⁴⁶ Komariyah, *Hukum Perdata*, (Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2002), halaman 179.

⁴⁷ Abdulkadir Muhammad, *Op. cit.*, halaman 85.

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Perkataan semua perjanjian dalam pasal 1338 KUH Perdata tersebut menunjukkan bahwa setiap orang bebas membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas membuat perjanjian dalam bentuk dan isinya, serta setiap orang bebas membuat perjanjian dengan siapapun. Akan tetapi kebebasan pihak-pihak dalam perjanjian dibatasi oleh undang-undang, kesusilaan baik dan ketertiban umum, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1337 KUH Perdata.

Ruang lingkup asas kebebasan berkontrak meliputi :

- 1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian
- 2) Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian
- 3) Kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dari perjanjian yang akan dibuatnya
- 4) Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian
- 5) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian
- 6) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (aanvullend optional)⁴⁸

⁴⁸ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, (Yogyakarta : LaksBang Mediatama, 2008), halaman 95-96.

Pelaksanaan asas kebebasan berkontrak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :

- 1) Semakin berpengaruhnya ajaran itikad baik di mana itikad baik tidak hanya ada pada pelaksanaan perjanjian, tetapi juga harus ada pada saat dibuatnya perjanjian
- 2) Semakin berkembangnya ajaran penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden* atau *undue influence*)⁴⁹

Setiawan menyatakan bahwa pembatasan kebebasan berkontrak dipengaruhi oleh :

- 1) Berkembangnya doktrin itikad baik
- 2) Berkembangnya doktrin penyalahgunaan keadaan
- 3) Makin banyaknya kontrak baku
- 4) Berkembangnya hukum ekonomi⁵⁰

Purwahid Patrik menyatakan bahwa terjadinya berbagai pembatasan kebebasan berkontrak disebabkan oleh :

- 1) Berkembangnya ekonomi yang membentuk persekutuan-persekutuan dagang, badan-badan hukum atau perseroan-perseroan, dan golongan-golongan masyarakat lain (misalnya : golongan buruh dan tani)
- 2) Terjadinya pemasyarakatan (*vermaatschappelijking*) keinginan adanya keseimbangan antar individu dan masyarakat yang tertuju kepada keadilan sosial

⁴⁹ *Ibid.*, halaman 99.

⁵⁰ *Ibid.* .

- 3) Timbulnya formalisme perjanjian
- 4) Makin banyak peraturan di bidang hukum tata usaha negara⁵¹

Sri Soedewi Maschoen Sofwan memberikan pendapatnya tentang terjadinya pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak adalah adanya :

- 1) Perkembangan masyarakat di bidang social ekonomi (misalnya : karena adanya penggabungan atau sentralisasi perusahaan)
- 2) Adanya campur tangan pemerintah untuk melindungi kepentingan umum atau pihak yang lemah
- 3) Adanya aliran dalam masyarakat yang menginginkan adanya kesejahteraan social.⁵²

c. Asas *pacta sunt servanda*, yaitu bahwa apa yang diperjanjikan mengikat para pihak sebagai undang-undang. Asas ini juga disimpulkan dari ketentuan pasal 1338 KUH Perdata. Perkataan mengikat mengandung makna bahwa masing-masing pihak dalam perjanjian harus menghormati dan melaksanakan isi perjanjian, serta tidak boleh melakukan perbuatan yang bertentangan dengan isi perjanjian.⁵³

d. Asas itikad baik (*goode trow*), yaitu terdapat dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yang berbunyi :

⁵¹ *Ibid.* .

⁵² *Ibid.*, halaman 100.

⁵³ Komariyah, *Op. cit.*, halaman 181.

“Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”

Asas itikad baik merupakan asas yang harus dilaksanakan para pihak dalam perjanjian berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu :

- 1) Itikad baik nisbi, yaitu orang melihat itikad baik dari tingkah laku nyata subjek perjanjian
- 2) Itikad baik mutlak, yaitu orang melihat atau menilai itikad baik berdasarkan akal sehat dan keadilan dengan membuat ukuran objektif untuk menilai keadaan, yaitu penilaian yang tidak memihak menurut norma-norma yang objektif.⁵⁴

e. Asas kepribadian (*personalitas*), merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang membuat perjanjian untuk kepentingan dirinya sendiri, bukan untuk kepentingan orang lain. Asas ini diatur dalam pasal 1315 KUH Perdata dan pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata berbunyi :

“Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri”

Pasal 1340 KUH Perdata, yaitu :

“Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya”

Pengecualian asas kepribadian terdapat dalam pasal 1317 KUH Perdata, yaitu perjanjian dapat berlaku untuk pihak ketiga dan

⁵⁴ Salim H. S., Hukum Kontrak, Op. cit., halaman 11.

juga terdapat dalam pasal 1318 KUH Perdata, dimana perjanjian selain berlaku untuk dirinya sendiri juga dapat berlaku untuk ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak daripadanya.⁵⁵

4. Syarat Sahnya Perjanjian

Suatu perjanjian agar dapat dilaksanakan harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan undang-undang atau yang disebut dengan syarat sahnya perjanjian dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal.

Kesepakatan dan kecakapan merupakan syarat-syarat subjektif, karena mengenai orangnya atau subjek perjanjian. Sedangkan suatu hal tertentu dan sebab yang halal merupakan syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjiannya atau mengenai objek yang diperjanjikan.⁵⁶ Agar lebih jelas, maka akan diuraikan tentang syarat sah perjanjian dalam pasal 1320 KUH Perdata, sebagai berikut :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

⁵⁵ Salim H.S., *Hukum Kontrak, Op. cit.*, halaman 10-13.

⁵⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian, Op. cit.*, halaman 17.

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya atau yang disebut kesepakatan para pihak dalam perjanjian merupakan kemauan/kehendak bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan, baik secara tegas atau secara diam-diam. Kemauan yang bebas dianggap tidak ada jika di dalam perjanjian itu telah terjadi cacat kehendak dalam pasal 1321 KUH Perdata dan terdiri atas : paksaan (*dwang*), yaitu seseorang dalam memberikan persetujuannya karena rasa takut pada suatu ancaman; terjadi kekhilafan (*dwaling*) , yaitu kekhilafan terhadap orang atau barang yang menjadi tujuan para pihak dalam perjanjian; dan yang terakhir adalah apabila terjadi penipuan (*bedrog*), yaitu jika satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar, disertai dengan kecurangan-kecurangan, sehingga pihak lain terbujuk untuk memberikan persetujuan.⁵⁷

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Para pihak dalam perjanjian haruslah cakap dan wenang berbuat hukum. Pada dasarnya setiap orang adalah cakap untuk berbuat hukum, kecuali jika oleh undang-undang dinyatakan

⁵⁷ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Op. cit.*, halaman 135.

tidak cakap, sebagaimana ketentuan pasal 1329 KUH Perdata. Ada tiga orang yang dianggap tidak cakap membuat perjanjian seperti yang tercantum dalam pasal 1330 KUH Perdata, yaitu :

- 1) Orang-orang yang belum dewasa/anak di bawah umur (*minderjarigheid*), yaitu mereka yang belum berumur 21 tahun atau belum menikah
- 2) Orang yang ditaruh di bawah pengampuan (*curatele*)
- 3) Orang-orang perempuan/istri. Namun sesuai perkembangan jaman, maka seorang istri dapat melakukan perbuatan hukum, berdasarkan pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. SEMA No. 3 Tahun 1963.⁵⁸

c. Suatu hal tertentu

Objek yang diperjanjikan haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu, dimana hal ini penting untuk menentukan kewajiban si berhutang apabila terjadi perselisihan. Barang yang diperjanjikan paling tidak harus ditentukan jenisnya, jumlah barang tidak perlu disebutkan, tetapi jumlah tersebut harus dapat dihitung atau ditetapkan kemudian, sebagaimana ketentuan 1333 KUH Perdata.

⁵⁸ Salim H. S., *Hukum Kontrak*, Op. cit., halaman 33-34.

Di dalam pasal 1332 KUH Perdata ditetapkan bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi objek perjanjian, sedangkan barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum tidak dapat dijadikan objek.

Barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi objek perjanjian, kecuali jika dilarang oleh undang-undang. Undang-undang melarang menggunakan suatu barang yang belum ada menjadi objek perjanjian, yaitu terhadap pelepasan hak atas warisan yang pewarisnya belum meninggal, atau mengadakan persetujuan mengenai hak tersebut, meskipun dengan izin pewaris, sebagaimana yang diatur di dalam pasal 1334 KUH Perdata. Undang-undang juga melarang penghibahan barang yang belum ada, tepatnya berdasarkan ketentuan pasal 1667 KUH Perdata.⁵⁹

d. Suatu sebab yang halal

Suatu sebab (*oorzaak/causa*) yang halal adalah suatu sebab yang diperbolehkan. Sebab berkaitan dengan tujuan, yaitu berdasarkan Hoge Raad (HR. 17 Nopember 1922, NJ. 1923, 155) suatu sebab merupakan sasaran/tujuan yang hendak dicapai kedua belah pihak

⁵⁹ R.M. Suryodiningrat, *Azas-Azas Hukum Perikatan*, (Bandung : Transito, 1985), halaman 109.

dalam perjanjian. Sebab harus dibedakan dengan motif atau desakan jiwa yang mendorong seseorang untuk membuat perjanjian dan motif ini tidak diperdulikan oleh hukum. Persetujuan tanpa sebab jarang sekali terjadi, bahkan dapat dikatakan tidak ada. Di dalam ketentuan pasal 1335 KUH Perdata diatur tentang perjanjian yang tidak mempunyai sebab atau dibuat dengan sebab yang palsu atau dilarang/tidak halal, maka tidak mempunyai kekuatan hukum. Suatu sebab yang palsu terdapat dalam perjanjian yang dibuat dengan pura-pura, yaitu untuk menyembunyikan sebab sebenarnya yang tidak diperbolehkan. Sedangkan sebab yang tidak diperbolehkan ialah sebab yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan baik, dan ketertiban umum, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1337 KUH Perdata.⁶⁰

Suatu perjanjian apabila tidak memenuhi salah satu syarat dalam perjanjian tersebut, maka akan menimbulkan akibat hukum yang berbeda. Jika yang tidak dipenuhi adalah syarat obyektif, maka perjanjian itu batal demi hukum. Hal ini berarti bahwa perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada, sehingga tidak ada dasar untuk menuntut di depan hakim. Sedangkan apabila yang tidak terpenuhi adalah syarat subyektif, maka salah satu pihak

⁶⁰ *Ibid.*, halaman 110-111.

berhak untuk menuntut pembatalan perjanjian di muka hakim, yang berarti bahwa perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Yang dapat meminta pembatalan dalam hal anak itu belum dewasa adalah anak itu sendiri jika sudah dewasa atau orang tua/walinya. Dalam hal seseorang yang berada di bawah pengampuan adalah pengampunya. Dan jika orang tersebut dalam memberikan kesepakatan secara tidak bebas, maka yang meminta pembatalan adalah orang itu sendiri. Bahaya pembatalan terdapat dalam pasal 1454 KUH Perdata, yaitu mengancam selama 5 (lima) tahun. Oleh karena itu undang-undang telah memberikan batasan terhadap jangka waktu untuk memintakan pembatalan selama 5 (lima) tahun. Bahaya pembatalan yang mengancam dapat dihilangkan dengan penguatan (*affirmation*) dari orang tua, wali, pengampunya, ataupun jika seseorang dalam memberikan kesepakatannya secara tidak bebas, maka penguatan dilakukannya sendiri.⁶¹

5. Ingkar Janji Dalam Perjanjian

Ingkar janji atau tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana yang telah diperjanjikan para pihak dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu ingkar janji karena kelalaian/kesalahan debitor (*wanprestasi*) dan bukan karena kesalahan debitor, tetapi karena suatu keadaan memaksa

⁶¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, *Op. cit.*, halaman 20-21.

(*overmacht/force majeure*).⁶² Proses terjadinya dan penyelesaian kedua peristiwa tersebut adalah berbeda, yaitu :

a. Wanprestasi

Di dalam *wanprestasi*, seorang debitor tidak melaksanakan perjanjian adalah karena kesalahannya.

Wanprestasi seorang debitor dapat berupa :

- 1) Tidak melakukan apa yang telah disanggupi untuk dilaksanakan/sama sekali tidak memenuhi perikatan
- 2) Melaksanakan apa yang diperjanjikan, namun tidak sebagaimana mestinya atau debitor keliru dalam memenuhi prestasi
- 3) Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi terlambat.⁶³

Akibat hukum bagi seorang debitor yang *wanprestasi* dapat berupa membayar kerugian kreditor atau yang disebut dengan membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian, peralihan risiko, dan dapat juga dengan membayar biaya perkara apabila sampai diperkarakan ke pengadilan.⁶⁴

Karena akibat *wanprestasi* yang terpenting adalah bahwa kreditor dapat meminta ganti rugi (*scadevergoeding*) atas ongkos, rugi, dan bunga. Ongkos/biaya merupakan segala pengeluaran yang telah dikeluarkan oleh satu pihak.

⁶² Mariam Darus Badruzaman, dkk., *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001), halaman 18.

⁶³ H. Mashudi dan Mohammad Chidir Ali, *Bab-Bab Hukum Perikatan*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 1995), halaman 64.

⁶⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, *Op. cit.*, halaman 45.

Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditor yang diakibatkan oleh kelalaian debitor. Sedangkan bunga merupakan kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang seharusnya diperoleh kreditor.⁶⁵ Kewajiban debitor untuk membayar ganti rugi kepada kreditor ini tidak dengan sendirinya timbul pada saat kelalaian terjadi, akan tetapi debitor harus dinyatakan lalai (*ingebrekestelling/inmorastelling*) oleh kreditor. Pernyataan lalai ditegaskan dalam pasal 1243 KUH Perdata, yaitu :

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”

Ada tiga bentuk pernyataan lalai berdasarkan pasal 1238 KUH Perdata, yaitu :

- 1) Berbentuk surat perintah (*bevel*) atau akta lain yang sejenis.
- 2) Berdasarkan kekuatan perjanjian itu sendiri. Apabila dalam surat perjanjian telah ditetapkan ketentuan bahwa debitor telah dianggap bersalah jika satu kali saja dia melewati batas waktu yang diperjanjikan.
- 3) Jika teguran kelalaian sudah dilakukan, baru kemudian dilakukan peringatan (*somasi/aanmaning*), yaitu debitor

⁶⁵ *Ibid.*, halaman 47.

agar melaksanakan kewajibannya sesuai teguran/ Pernyataan lalai dari kreditor.⁶⁶

Ganti rugi yang dapat dituntut oleh kreditor kepada debitor, jika kreditor dapat membuktikan terjadinya *wanprestasi*, dapat berupa kerugian yang diderita kreditor dan keuntungan yang seharusnya diterima kreditor seandainya perjanjian tersebut dilaksanakan, sebagaimana ketentuan pasal 1246 KUH Perdata. Selain ganti rugi, seorang kreditor dapat melakukan tuntutan terhadap :

- 1). Pemenuhan perikatan (*nakomen*)
- 2). Pemutusan perikatan, jika perjanjiannya timbal balik maka berhak menuntut pembatalan perikatan (*ontbinding*)
- 3). Ganti rugi (*scadevergoeding*)
- 4). Pemenuhan perikatan dan ganti rugi
- 5). Pemutusan/pembatalan perikatan dan ganti rugi.⁶⁷

Di dalam hukum kontrak Amerika, sanksi utama terhadap *breach of contract* adalah pembayaran *compensation* (ganti rugi), yang terdiri atas biaya (*cost*) dan ganti rugi (*damages*), serta tuntutan pembatalan perjanjian (*rescission*).⁶⁸

⁶⁶ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung : Alumni, 1986), halaman 61-62.

⁶⁷ Mariam Darus Badruzaman, dkk., *Op. cit.*, halaman 21.

⁶⁸ Salim H. S., *Hukum Kontrak*, *Op. cit.*, halaman 99.

Berdasarkan pasal 1249 KUH Perdata, ditentukan bahwa bentuk ganti rugi karena *wanprestasi* hanya ditentukan dalam bentuk uang. Namun dalam perkembangannya kerugian yang timbul dapat berupa kerugian materiil/kerugian dalam bentuk uang/kekayaan/benda dan kerugian immateriil/kerugian yang tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang. Jumlah ganti rugi dapat diberikan berdasarkan :

- 1) Para pihak menentukan sendiri besarnya jumlah ganti rugi (pasal 1249 KUH Perdata)
- 2) Jika tidak terdapat ketentuan dalam undang-undang dan para pihak sendiri juga tidak menentukan, maka besarnya ganti rugi harus ditentukan berdasarkan kerugian yang benar-benar telah diderita, atau dapat juga diduga suatu keadaan kekayaan kreditor harus sama seperti apabila debitor memenuhi kewajibannya.⁶⁹

b. Overmacht/Force majeure

Ketentuan tentang *overmacht* terdapat dalam pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata. Yaitu :

Pasal 1244 KUH Perdata :

“Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat

⁶⁹ *Ibid.*, halaman 23-24.

dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.”

Pasal 1245 KUH Perdata :

“Tidaklah biaya, rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berhutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.”

Ketentuan pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata tersebut memberikan kelonggaran bagi debitor untuk tidak mengganti biaya, rugi, dan bunga kepada kreditor, karena keadaan yang berada di luar kekuasaannya, yaitu :

- 1) Adanya suatu hal yang tak terduga sebelumnya
- 2) Terjadinya secara kebetulan
- 3) Adanya keadaan memaksa.

Jadi yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah suatu keadaan dimana debitor tidak dapat melaksanakan prestasinya kepada kreditor, karena terjadinya suatu keadaan di luar kekuasaannya.⁷⁰ Sedangkan untuk terjadinya *overmaht* harus memenuhi tiga unsur, yaitu :

- 1) Debitor tidak memenuhi prestasi
- 2) Ada sebab di luar kesalahan debitor

⁷⁰ Salim HS., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, *Op. cit.*, halaman 182-183.

- 3) Faktor penyebab tersebut tidak dapat diduga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitor.⁷¹

Overmacht dapat dibedakan menjadi *overmacht* absolut dan relatif. *Overmacht* absolut merupakan keadaan dimana debitor sama sekali tidak dapat memenuhi perutangannya kepada kreditor. Sedangkan *overmacht* relatif adalah keadaan yang menyebabkan debitor masih mungkin untuk melaksanakan prestasinya, tetapi harus dengan suatu pengorbanan yang besar.⁷²

Berdasarkan ketentuan pasal 1245 KUH Perdata, akibat *overmacht* adalah menghapuskan kewajiban debitor untuk membayar ganti rugi. Debitor harus membuktikan terjadinya *overmacht* tersebut. Namun pada dasarnya akibat dari *overmacht* dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

- 1) Membebaskan debitor membayar ganti rugi/*scadevergoeding* atau pembebasan mutlak, karena hak kreditor untuk menuntut debitor adalah gugur untuk selama-lamanya.
- 2) Membebaskan debitor dari kewajiban memenuhi prestasi, yang sifatnya relatif yaitu menunda pemenuhan prestasi, selama *overmacht* yang menghalangi debitor untuk memenuhi prestasi masih ada. Jadi apabila halangan

⁷¹ Mariam Darus Badruzaman, dkk., *Op. cit.*, halaman 26-27.

⁷² *Ibid.*, halaman 25.

untuk memenuhi prestasi telah tidak ada, maka debitor wajib memenuhi prestasi kepada kreditor.⁷³

6. Bentuk Perjanjian

Perjanjian dapat dibuat secara lisan dimana cukup secara lisan kesepakatan para pihak, maupun tertulis yang dapat dijadikan bukti apabila terjadi perselisihan. Ada tiga bentuk perjanjian tertulis, yaitu :

- a. Perjanjian di bawah tangan adalah perjanjian-perjanjian yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja dan hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tidak mengikat pihak ketiga.
- b. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Kesaksian notaris adalah terbatas pada pengesahan tanda tangan para pihak, tidak mempengaruhi kekuatan hukum isi perjanjian.
- c. Perjanjian yang dibuat di hadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notariil, yang merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak maupun pihak ketiga.⁷⁴

Akta autentik mempunyai tiga fungsi, yaitu :

- a. Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu

⁷³ M. Yahya Harahap, *Op. cit.*, halaman 95-96.

⁷⁴ Salim HS., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, *Op. cit.*, halaman 166-167.

- b. Sebagai bukti untuk para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak
- c. Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu, kecuali jika ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian. Hal tersebut menentukan juga bahwa perjanjian yang dibuat para pihak telah sesuai dengan kehendak para pihak.⁷⁵

7. Terjadinya Perjanjian

Di dalam KUH Perdata, tidak disebutkan secara jelas tentang momentum terjadinya kontrak, namun dalam pasal 1320 KUH Perdata hanya disebutkan kesepakatan para pihak. Ada empat teori yang dapat menjelaskan momentum terjadinya kontrak, yaitu :

- a. Teori pernyataan (*uitingstheorie*), adalah teori yang menyatakan bahwa kesepakatan (*toesteming*) terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran menyatakan bahwa ia menerima penawaran tersebut. Kelemahan teori ini adalah bahwa teori ini sangat teoritis karena dianggap terjadinya kesepakatan secara otomatis.
- b. Teori pengiriman (*verzendingstheorie*), yaitu kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran mengirimkan

⁷⁵ Salim HS., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*, (Jakarta : Sinar grafika, 2005, halaman 33.

telegram. Kapan pihak yang menerima penawaran mengirimkan telegram adalah sulit diketahui oleh pihak yang menawarkan, sehingga teori pengiriman sangat teoritis, dimana terjadinya kesepakatan dianggap secara otomatis.

- c. Teori pengetahuan (*vernemingstheorie*), berpendapat bahwa kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan mengetahui adanya *acceptatie* (penerimaan), tetapi penerimaan itu belum diterimanya atau tidak diketahui secara langsung. Kelemahan teori ini terletak pada bagaimana orang yang menawarkan mengetahui isi penerimaan itu apabila belum menerimanya.
- d. Teori penerimaan (*ontvangstheorie*), menyatakan bahwa kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.⁷⁶

8. Berakhirnya Perjanjian

Pada dasarnya dalam setiap perikatan yang lahir dari perjanjian adalah perikatan yang dikehendaki oleh para pihak yang berjanji. Dalam pandangan demikian, maka setiap perjanjian harus dapat diupayakan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana yang telah diperjanjikan, sebagai tujuan dilaksanakannya perjanjian tersebut. Tidak dipenuhinya perikatan yang bersumber dari perjanjian, demi hukum

⁷⁶ Salim H. S., *Hukum Kontrak*, Op. cit., halaman 40-41.

menghapuskan perikatan tersebut, akan tetapi tidak menghapuskan perjanjian yang telah dibuat.⁷⁷ Di dalam pasal 1381 KUH Perdata terdapat sepuluh ketentuan berakhirnya perikatan, yaitu :

- a. dilaksanakannya pembayaran
- b. penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan
- c. pembaharuan utang
- d. perjumpaan utang atau kompensasi
- e. percampuran utang
- f. pembebasan utang
- g. musnahnya barang yang terutang
- h. kebatalan atau pembatalan perjanjian
- i. berlakunya syarat batal sebagaimana yang diatur dalam Bab I KUH Perdata
- j. karena daluwarsa.

Tidak menutup kemungkinan suatu perjanjian yang telah dibuat para pihak dapat hapus karena suatu hal, yaitu :

- a. Telah ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak, misalnya bahwa perjanjian akan berlaku untuk waktu tertentu.
- b. Undang-undang menentukan batas berlakunya suatu perjanjian, misalnya dalam pasal 1066 ayat 3 KUH Perdata

⁷⁷ Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Hapusnya Perikatan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), halaman 3.

ditentukan bahwa ahli waris dapat mengadakan persetujuan untuk selama waktu tertentu tidak melakukan pemecahan harta warisan, tetapi jangka waktu perjanjian tersebut dibatasi oleh pasal 1066 ayat 4 KUH Perdata hanya untuk lima tahun.

- c. Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu, maka persetujuan akan hapus. Misalnya persetujuan menjadi hapus dengan meninggalnya salah satu pihak, seperti dalam perjanjian kerja, pemberian kuasa, perjanjian perseroan.
- d. Adanya pernyataan menghentikan perjanjian (*opzegging*), yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak atau oleh salah satu pihak. *Opzegging* hanya terdapat dalam perjanjian-perjanjian yang bersifat sementara, seperti perjanjian kerja, perjanjian sewa menyewa.
- e. Perjanjian hapus karena putusan hakim
- f. Tujuan perjanjian telah tercapai
- g. Perjanjian hapus karena persetujuan para pihak (*herroeping*).⁷⁸

⁷⁸ R. Setiawan, *Op. cit.*, halaman 69.

B. Perjanjian Baku

1. Pengertian Perjanjian Baku

Perjanjian baku sebenarnya dikenal sejak zaman Yunani Kuno. Perjanjian baku dialihbahasakan dari istilah yang dikenal dari bahasa Belanda, yaitu *standard contract* atau *standaard voorwaarden*. Hukum Inggris menyebut perjanjian baku sebagai *standarized contract, standardized agreement*.⁷⁹

Latar belakang tumbuhnya perjanjian baku karena keadaan sosial ekonomi. Perusahaan besar, perusahaan pemerintah mengadakan kerjasama dalam suatu organisasi dan untuk kepentingan mereka, ditentukan syarat-syarat secara sepihak. Pihak lawannya (*wederpartij*) pada umumnya mempunyai kedudukan (ekonomi) lemah baik karena posisinya, maupun karena ketidaktahuannya, hanya menerima apa yang disodorkan. Dengan penggunaan perjanjian baku ini, maka pengusah akan memperoleh efisiensi dalam pengeluaran biaya, tenaga, dan waktu.⁸⁰

Pengertian perjanjian baku atau standar kontrak yaitu perjanjian yang telah dibakukan.⁸¹ Jika bahasa hukum dibakukan berarti bahasa hukum itu ditentukan ukurannya, standarnya,

⁷⁹ Johannes Ibrahim, *Op. cit.*, halaman 52.

⁸⁰ Mariam Darus Badrul Zaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung : Alumni, 1994), halaman 46.

sehingga memiliki arti tetap, yang dapat menjadi pegangan umum.⁸²

Sluijter mengemukakan bahwa perjanjian baku adalah bukan perjanjian, sebab kedudukan pengusaha di dalam perjanjian itu ialah seperti pembentuk undang-undang swasta (*legio particuliere wetgever*). Syarat-syarat yang ditentukan pengusaha di dalam perjanjian itu adalah undang-undang bukan perjanjian.⁸³

Pitlo mengatakan bahwa perjanjian baku itu sebagai perjanjian paksa (*dwang contract*), walaupun teoritis yuridis, suatu perjanjian baku tidak memenuhi ketentuan undang-undang dan oleh beberapa ahli hukum ditolak, tetapi masyarakat dalam kenyataannya berkembang dengan arah yang berlawanan dengan keinginan yang ingin dicapai oleh suatu hukum.⁸⁴

Stein berpendapat bahwa perjanjian baku dapat diterima sebagai perjanjian, berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan (*fictie van wil en vertrouwen*) yang membangkitkan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri pada perjanjian tersebut. Apabila debitor menerima dokumen perjanjian, mengandung arti bahwa debitor secara sukarela setuju pada isi perjanjian.⁸⁵

⁸² Johanes Ibrahim, *Loc. cit.* .

⁸³ Mariam darus Badruzaman, *Op. cit.*, halaman 52.

⁸⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Op.cit.*, halaman 53.

⁸⁵ *Ibid.*, halaman 53.

Asser Rutten menyatakan terhadap setiap orang yang menandatangani suatu perjanjian, maka ia bertanggungjawab pada isi dan apa yang ditandatanganinya. Apabila ada orang yang membubuhkan tanda tangan pada suatu perjanjian baku, maka tanda tangan tersebut akan membangkitkan suatu kepercayaan, yaitu bahwa siapa yang bertandatangan mengetahui dan menghendaki isi formulir yang ditandatanganinya. Seseorang tidaklah mungkin menandatangani apa yang tidak diketahuinya.⁸⁶

Hondius memberikan pendapatnya terhadap perjanjian baku sebagai perjanjian yang mempunyai kekuatan mengikat, berdasarkan kebiasaan (*gebruik*) yang berlaku di lingkungan masyarakat dan perdagangan.⁸⁷

Sutan Remy Sjahdeini mengartikan perjanjian baku sebagai perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Adapun yang belum dibakukan hanya beberapa hal, misalnya yang menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu, dan beberapa hal yang spesifik dari objek yang diperjanjikan. Sjahdeini menekankan, yang dibakukan bukan formulir perjanjian tersebut, melainkan klausul-klausulnya.⁸⁸

⁸⁶ *Ibid.*, halaman 53.

⁸⁷ *Ibid.*, halaman 53.

⁸⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. cit.*, halaman 66.

Hondius dalam Salim H.S. mengemukakan bahwa dewasa ini terdapat syarat-syarat baku, di hampir semua bidang yang dibuat kontrak. Syarat-syarat baku merupakan syarat-syarat konsep tertulis yang dimuat dalam beberapa perjanjian yang masih akan dibuat, yang jumlahnya tidak tentu, tanpa membicarakan isinya terlebih dahulu.⁸⁹

Perjanjian baku isinya dibuat secara sepihak, dalam arti salah satu pihak telah menentukan isi dan bentuk perjanjian pada satu bentuk pembuatannya, sehingga dapat dikatakan bahwa dalam perjanjian baku kedudukan para pihak dalam perjanjian tidak seimbang, yaitu satu pihak pada posisi kuat dan pihak lainnya pada posisi lemah. Kedudukan para pihak yang tidak seimbang menyebabkan pihak yang posisi ekonominya lemah menjadi tidak mempunyai pilihan lain kecuali menerima atau menolak perjanjian tersebut.⁹⁰ Vera Bolger dalam Mariam Darus Badruzaman menamakannya *take it or leave it contract*, jika debitor menyetujui salah satu syarat-syarat, maka debitor mungkin hanya bersikap menerima atau tidak menerimanya sama sekali, kemungkinan untuk mengadakan perubahan itu sama sekali tidak ada.⁹¹

Sriwati dalam Celina Tri Siwi Kristiyanti mengemukakan bahwa perjanjian baku banyak memberikan keuntungan dalam penggunaannya, tetapi ada sisi kelemahan perjanjian baku yang

⁸⁹ Salim H.S., *Hukum Kontrak*, *Op. cit.*, halaman 108.

⁹⁰ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op. cit.*, halaman 140.

⁹¹ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum bisnis*, *Op.cit.*, halaman 46.

harus diperhatikan yaitu dalam mengakomodasikan posisi seimbang bagi para pihaknya. Kelemahan-kelemahan perjanjian baku ini bersumber dari karakteristik perjanjian baku yang dalam wujudnya merupakan suatu perjanjian terstandarisasi yang menyisakan sedikit atau bahkan tidak sama sekali ruang bagi pihak lain dalam menegosiasikan isi perjanjian itu. Sorotan para ahli hukum dari berlakunya perjanjian baku selain dari segi keabsahannya adalah adanya klausul-klausul yang tidak adil dan sangat memberatkan salah satu pihak.⁹²

Keabsahan berlakunya perjanjian baku tidak perlu dipersoalkan tetapi perlu diatur aturan-aturan dasarnya sebagai aturan-aturan mainnya agar klausul-klausul atau ketentuan-ketentuan dalam perjanjian baku itu, baik sebagian maupun seluruhnya, mengikat pihak lainnya.⁹³

2. Ciri-Ciri Perjanjian Baku :

Perjanjian baku lahir dari kebutuhan akan efisiensi serta efektifitas kerja, maka bentuk perjanjian baku ini pun memiliki karakteristik yang khas yang tidak dimiliki oleh perjanjian yang lain pada umumnya, karena perjanjian baku memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi (ekonominya) kuat

⁹² Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op.cit.*, halaman 140.

⁹³ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*, halaman 71.

- b. Masyarakat (debitor) sama sekali tidak ikut-ikut bersama-sama menentukan isi perjanjian
- c. Terdorong oleh kebutuhannya, debitor terpaksa menerima perjanjian itu
- d. Bentuk tertentu (tertulis)
- e. Dipersiapkan secara massal dan kolektif.⁹⁴

3. Jenis-Jenis Perjanjian Baku

Dalam praktek ada 4 jenis perjanjian baku, yaitu :

- a. Perjanjian baku sepihak, adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kedudukannya dalam perjanjian lebih kuat, yaitu kreditor sebagai pihak yang mempunyai posisi ekonomi lebih kuat dibandingkan pihak debitor.
- b. Perjanjian baku timbal balik, adalah perjanjian baku yang isinya ditentukan oleh kedua belah pihak, misalnya perjanjian baku yang terdiri atas pihak majikan (kreditor) dan pihak buruh (debitor). Biasanya para pihak terikat dalam organisasi, seperti dalam perjanjian buruh kolektif.
- c. Perjanjian baku yang ditentukan pemerintah, adalah perjanjian baku yang isinya ditentukan oleh pemerintah terhadap perbuatan-perbuatan hukum tertentu, misalnya pada perjanjian yang mempunyai obyek hak atas tanah.

⁹⁴ Salim HS., *Hukum Kontrak, Op. cit.*, halaman 107.

- d. Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaris atau advokat, adalah perjanjian yang konsepnya sudah disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota a pelaktersebut.⁹⁵

4. Penggolongan Perjanjian Baku

Mariam Darus Badrulzaman menggolongkan perjanjian baku ke dalam dua golongan, sebagai berikut :

- a. Perjanjian baku umum, yaitu perjanjian yang bentuk dan isinya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh kreditor kemudian disodorkan pada debitor
- b. Perjanjian baku khusus, yaitu perjanjian baku yang dinamakan terhadap perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah, baik adanya dan berlakunya perjanjian ini untuk para pihak ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah.⁹⁶

5. Klausula Baku

Pengertian klausula baku di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 1 ayat 10 adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Klausula baku yang tidak boleh dicantumkan dalam suatu perjanjian, dan apabila dicantumkan dalam perjanjian, maka

⁹⁵ *Ibid.*, halaman 108-109.

⁹⁶ Gatot Supramono, *Perbankan Dan Masalah Kredit (Suatu Tinjauan Yuridis)*, (Jakarta : Djambatan, 1997), halaman 62-63.

menjadikan perjanjian tersebut batal demi hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, pencantuman klausula baku harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

a. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :

- 1) Menyatakan barang pengalihan tanggung jawab pelaku usaha dan/atau
- 2) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen
- 3) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen
- 4) Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran
- 5) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen

- 6) Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obbjek jual beli jasa
 - 7) Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya
 - 8) Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran
9. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
10. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dinyatakan batal demi hukum
11. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

6. Klausula Eksonerasi

Klausula eksonerasi digunakan oleh Mariam Darus Badruzaman sebagai terjemahan dari *exoneratie clause* yang

dipakai dalam Bahasa Belanda,⁹⁷ yaitu klausul yang berisi pembatasan pertanggungjawaban dari kreditor, terhadap risiko dan kelalaian yang mesti ditanggungnya.⁹⁸

David Yates menyebut klausula eksonerasi dengan *exclusion clause* yaitu sebagai setiap bagian dari suatu perjanjian yang membatasi, membebaskan atau merekayasa ganti rugi atau tanggung jawab yang timbul dari pelanggaran terhadap suatu perjanjian. David Yates memberikan pengertian lebih luas terhadap klausul eksonerasi sebagai klausul yang kehadirannya untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab yang mungkin saja muncul.⁹⁹

Sutan Remy Sjahdeini memberikan pengertian klausula eksonerasi sebagai klausul yang bertujuan membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya dalam hal yang bersangkutan tidak atau tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan di dalam perjanjian tersebut.¹⁰⁰

Engels mengemukakan tiga bentuk yuridis dari perjanjian yang menggunakan klausula eksonerasi di dalamnya, yaitu :

- a. Tanggung jawab untuk akibat-akibat hukum, karena kurang baik dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban perjanjian

⁹⁷Sutan Remy Sjahdeini, *Op. cit.*, halaman 72.

⁹⁸Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op. cit.*, halaman 141.

⁹⁹Sutan Remy Sjahdeini, *Op. cit.*, halaman 74-75.

¹⁰⁰Sutan Remy Sjahdeini, *Op. cit.*, halaman 75.

- b. Kewajiban-kewajiban sendiri yang biasanya dibebankan kepada pihak untuk mana syarat dibuat, dibatasi, atau dihapuskan (misalnya, perjanjian keadaan darurat)
- c. Kewajiban-kewajiban diciptakan (syarat-syarat pembebasan oleh salah satu pihak dibebankan dengan memikulkan tanggung jawab pihak yang lain yang mungkin ada untuk kerugian yang diderita pihak ketiga.¹⁰¹

Engels memberikan pendapatnya tentang berlakunya klausula eksonerasi, yaitu :

- a. Klausula eksonerasi untuk kesengajaan sendiri pada umumnya dianggap melawan kesusilaan (pasal 1335 dan pasal 1337 KUHPerdara), meskipun tidak ada keputusan umum dari Hoge Raad
- b. Klausula eksonerasi untuk kesalahan besar, tidak jelas maka harus diteliti dari suatu kejadian ke lain kejadian apakah telah melampaui batas-batas yang diizinkan
- c. Klausula eksonerasi untuk kesalahan ringan yang dibuat sendiri umumnya diterima, hanya Houwing berpendapat bahwa di sinipun tidak dapat diberi peraturan umum. Selalu harus diteliti maksud dari pihak-pihak yang bersangkutan dan keadaan-keadaan

¹⁰¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op.cit.*, halaman 141-142.

- d. Klausula eksonerasi untuk kesalahan atau kesengajaan dari orang-orang bawahan dengan tegas diperbolehkan oleh Hoge Raad.¹⁰²

Klausula eksonerasi mengakibatkan pihak yang mempunyai kedudukan ekonomi lemah terbebani. Agar tidak memberatkan kedudukan salah satu pihak dalam perjanjian, maka dapat dilakukan beberapa langkah sebagai berikut :

- a. Dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersifat mengatur hak dan kewajiban berdasarkan itikad baik
- b. Penulisan klausula eksonerasi dibuat secara jelas dan mudah dibaca oleh setiap orang yang mau mengadakan perjanjian dengan pihak tersebut
- c. Klausula eksonerasi tidak boleh dibuat mengenai syarat pokok (condition)
- d. Klausula eksonerasi memuat kewajiban menanggung bersama akibat yang timbul dari perjanjian itu, misalnya jika terdapat kerusakan pada barang yang dibeli, maka penjual menanggung biaya servis.¹⁰³

Pencantuman klausula eksonerasi dalam suatu perjanjian adalah harus :

- a. Menonjol dan jelas, penulisan klausula eksonerasi harus dilakukan sedemikian rupa sehingga orang yang

¹⁰² Purwahid Patrik, *Asas Itikad Baik Dan Kepatutan Dalam Perjanjian*, (Semarang : Badan Penerbit Undip, 1986), halaman 40.

¹⁰³ Abdulkadir Muhammad, *Op. cit.*, halaman 129-130.

berkepentingan akan memperhatikannya, misalnya dicetak dalam huruf besar atau dicetak dengan tulisan dan warna yang kontras, dan tentu saja hal ini dimuat dalam bagian penting dari perjanjian. Tanggung gugat tidak dapat dibenarkan jika penulisannya tidak menonjol dan tidak jelas.

- b. Disampaikan tepat waktu, pengecualian tanggung gugat hanya efektif apabila disampaikan tepat waktu. Setiap pengecualian tanggung gugat harus disampaikan pada saat penutupan perjanjian, sehingga merupakan bagian dari kontrak, sehingga tidak disampaikan setelah perjanjian jual beli terjadi
- c. Pemenuhan tujuan-tujuan penting, pemenuhan tanggung gugat tidak dapat dilakukan jika pembatasan tersebut tidak akan memenuhi tujuan penting dari suatu jaminan, misalnya tanggung gugat terhadap cacat tersembunyi tidak dapat dibatasi dalam batas waktu tertentu, jika cacat tersembunyi tidak ditemukan dalam jangka waktu tersebut
- d. Adil, jika pengadilan menemukan perjanjian atau klausula perjanjian yang tidak adil, maka pengadilan dapat menolak untuk melakukannya, atau melaksanakannya tanpa klausula yang tidak adil.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), halaman 118-119.

Berlakunya klausul eksonerasi menurut Treitel, adalah dengan adanya :

- a. *Signature* (penandatanganan), dengan seseorang menandatangani surat perjanjian adalah terikat oleh janji-janji yang ada meskipun ia tidak membacanya
- b. *Notice* (pemberitahuan), apabila klausula eksonerasi telah tercetak di atas surat yang diserahkan dari satu pihak kepada yang lain, atau diumumkan pada waktu perjanjian itu dibuat, syarat itu akan termasuk dalam perjanjian apabila syarat itu telah diberitahukan secara pantas kepada pihak lawannya.¹⁰⁵

Pihak debitor atau konsumen dapat dilindungi terhadap pihak yang membuat klausula eksonerasi apabila dapat membuktikan bahwa :

- a. Klausula eksonerasi itu bertentangan dengan kesusilaan dan adalah batal menurut hukum (*van rechtswege nietig*)
- b. Klausula eksonerasi tersebut dibuat dengan menyalahgunakan keadaan, sehingga perjanjian itu dapat dibatalkan (*vernietigbaar*)
- c. Klausula eksonerasi itu tidak diberitahukan secara pantas kepada pihak lain sehingga syarat-syarat tersebut tidak

¹⁰⁵Purwahid Patrik, *Op. cit.*, halaman 45-46.

merupakan bagian dari perjanjian, dan klausula itu tidak mengikat.¹⁰⁶

C. Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian memberikan pengertian koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

2. Landasan Dan Asas Koperasi

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berasaskan kekeluargaan.

3. Tujuan Koperasi

Tujuan koperasi yang tercantum di dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yaitu untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

¹⁰⁶ Purwahid Patrik, *Op. cit.*, halaman 47.

4. Fungsi Dan Peran Koperasi

Koperasi yang berdasarkan kekeluargaan dan kegotongroyongan tidak berarti bahwa koperasi meninggalkan sifat dan syarat-syarat ekonominya sehingga kehilangan efisiensinya. Fungsi dan peran koperasi berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah sebagai berikut :

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi

5. Prinsip Koperasi

Koperasi menjalankan kegiatannya dengan berdasarkan prinsip koperasi yang terdapat di dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, yaitu :

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
- c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggotanya
- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
- e. Kemandirian

Dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut :

- a. Pendidikan perkoperasian
- b. Kerjasama antar koperasi

6. Bentuk Dan Jenis Koperasi

Di dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dinyatakan bahwa koperasi dapat berbentuk Koperasi Primer, yaitu koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang atau berbentuk Koperasi Sekunder, yaitu merupakan koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi.

Jenis koperasi yang ditegaskan dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian adalah bahwa jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya.

7. Kegiatan Usaha Koperasi

Kegiatan usaha koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian pada BAB VIII tentang Lapangan Usaha, dimana koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat dan koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam.

D. Pinjaman Uang

1. Pengertian Pinjaman Uang

Pengertian pinjaman yang diatur di dalam pasal 1 ayat 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan pinjam Oleh Koperasi yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pembayaran sejumlah imbalan.

Pemberian pinjaman yang dilakukan koperasi, berdasarkan Pasal 19 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi wajib memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat dengan memperhatikan penilaian

kelayakan dan kemampuan pemohon pemberian pinjaman, disertai pelaksanaan prinsip kesehatan dan prinsip kehati-hatian, untuk memberikan pedoman dalam pemberian pinjaman yang dilakukan oleh koperasi dalam menjaga kesehatan usahanya. Penjelasan Pasal 19 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi menguraikan tentang pengertian asas pemberian pinjaman yang sehat adalah sebagai pemberian pinjaman yang didasarkan atas penilaian kelayakan dan kemampuan permohonan pinjaman. Ketentuan tentang prinsip kesehatan dan prinsip kehati-hatian yang ditetapkan oleh Menteri dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi usaha pemberian pinjaman yang dilakukan oleh koperasi dalam menjaga kesehatan usahanya, karena usaha pemberian pinjaman merupakan sarana pengelolaan dana. Pemberian pinjaman harus berdasarkan keyakinan yang telah diperoleh koperasi atas :

- a. Watak Debitor, yaitu penilaian terhadap sikap atau perilaku debitor. Penilaian watak debitor dilakukan untuk mengetahui sikap pertanggungjawabannya, apakah nanti jika memperoleh pinjaman akan benar-benar dipergunakan untuk kepentingan usahanya dan apakah debitor besar kemauannya untuk mengembalikan pinjaman yang telah diperolehnya

- b. Kemampuan Debitor, yaitu kemampuan untuk mengelola usaha debitor. Apabila debitor mempunyai kemampuan mengelola usahanya dengan baik dan bekerja secara professional, maka diperkirakan usaha yang nantinya dibiayai dengan pinjaman yang telah diberikan oleh koperasi dapat berjalan dengan lancar. Dengan berhasilnya usaha debitor, maka pengembalian pinjaman juga akan berjalan lancar
- c. Modal debitor, penilaian terhadap permodalan debitor bertujuan untuk mengetahui keadaan keuangan debitor, apakah pada waktu mengajukan permohonan pinjaman tersebut debitor dalam keadaan sehat kondisi keuangannya. Penilaian terhadap modal debitor juga dilakukan karena pada dasarnya koperasi tidak membiayai seluruh modal yang diperlukan debitor, koperasi hanya membiayai sebagian saja dan sisanya dibiayai sendiri oleh debitor
- d. Jaminan, pemberian pinjaman akan aman kalau debitor memberikan jaminan pemberian pinjaman. Jaminan yang diberikan debitor kepada kreditor dapat dipergunakan untuk pelunasan pinjaman, apabila di kemudian hari debitor tidak dapat mengembalikan pinjaman yang telah diperolehnya
- e. Prospek Usaha Debitor, koperasi melakukan penilaian terhadap prospek usaha debitor adalah untuk mengetahui tentang bagaimana masa depan proyek debitor yang akan dibiayai

dengan pinjaman, apakah pada masa yang akan datang usaha debitor dapat mendatangkan keuntungan atau masih menghadapi hambatan.¹⁰⁷

2. Unsur-Unsur Pinjaman Uang

Pinjaman yang diberikan oleh suatu Koperasi didasarkan atas kepercayaan, sehingga dengan demikian pemberian pinjaman merupakan pemberian kepercayaan. Ini berarti bahwa suatu Koperasi baru akan memberikan pinjaman kalau betul-betul yakin bahwa si penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua pihak. Tanpa keyakinan tersebut, suatu koperasi tidak akan meneruskan simpanan masyarakat yang diterimanya. Dengan demikian bahwa pinjaman terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi pinjaman bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang
- b. Waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang.

¹⁰⁷ Gatot Supramono, *Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Perkreditan*, (Bandung : Alumni, 1997), halaman 40-46.

- c. Degree of risk, yaitu suatu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima di kemudian hari
- d. Prestasi atau objek pinjaman itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk barang atau jasa, namun karena kehidupan modern sekarang ini didasarkan kepada uang maka transaksi-transaksi pinjaman yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam praktek pinjaman uang¹⁰⁸

3. Tujuan Pemberian Pinjaman Uang

Pinjaman diberikan dengan maksud untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

4. Jenis Pinjaman Uang

- a. Pinjaman uang dilihat dari sudut tujuannya
 - 1) Pinjaman uang konsumtif, yaitu pinjaman uang yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses konsumtif
 - 2) Pinjaman uang produktif, yaitu pinjaman uang yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi

¹⁰⁸H. R. Daeng Naja, *Hukum Kredit Dan Bank Garansi (The Bankers Hand Book)*, Op. cit., halaman 124.

- 3) Pinjaman uang perdagangan, yaitu pinjaman uang yang diberikan dengan tujuan untuk membeli barang-barang untuk dijual lagi, yang terdiri dari pinjaman uang perdagangan dalam negeri dan pinjaman uang perdagangan luar negeri
- b. Pinjaman uang dilihat dari sudut jangka waktunya
- 1) Pinjaman uang jangka pendek (*short term loan*), yaitu pinjaman uang yang berjangka waktu maksimum satu tahun. Dalam pinjaman uang jangka pendek juga termasuk pinjaman uang untuk tanaman musiman yang berjangka waktu lebih dari satu tahun.
 - 2) Pinjaman uang jangka menengah (*medium term loan*), yaitu pinjaman uang yang berjangka waktu antara satu sampai tiga tahun, kecuali pinjaman uang untuk tanaman musiman.
 - 3) Pinjaman uang jangka panjang (*long term loan*), yaitu pinjaman uang yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun. Pinjaman uang jangka panjang ini pada umumnya adalah pinjaman uang investasi yang bertujuan menambah modal perusahaan dalam rangka untuk melakukan rehabilitasi, ekspansi (perluasan), dan pendirian proyek baru.¹⁰⁹
- c. Pinjaman uang dilihat dari sudut jaminannya
- 1) Pinjaman uang tanpa jaminan (*Unsecured loan*), yaitu pinjaman uang yang diberikan tanpa menggunakan jaminan

¹⁰⁹ H. R. Daeng Naja, *Contract Drafting*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006), halaman 54.

- 2) Pinjaman uang dengan jaminan (*Secured Loan*), yaitu pinjaman uang yang diberikan dengan menggunakan jaminan baik jaminan barang, jaminan pribadi, maupun jaminan efek-efek saham, obligasi, dan sertifikat yang didaftar (*listed*) di bursa-bursa efek.

d. Pinjaman uang dilihat dari sudut penggunaannya

- 1) Pinjaman uang eksploitasi yang disebut juga dengan pinjaman uang modal kerja atau pinjaman uang produk, yaitu pinjaman uang berjangka waktu pendek yang diberikan oleh suatu koperasi kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan sehingga dapat berjalan dengan lancar
- 2) Pinjaman uang investasi, yaitu pinjaman uang jangka menengah atau jangka panjang yang diberikan oleh suatu koperasi kepada perusahaan untuk melakukan penanaman modal.¹¹⁰

e. Pinjaman uang dilihat dari cara-cara atau syarat-syarat pembayaran pinjaman uang dan disesuaikan dengan jangka waktu pemberian pinjaman uang, yaitu :

- 1) Pinjaman angsuran, disebut juga dengan pinjaman tetap, yaitu pinjaman yang dibayar secara angsuran hutang pokok ditambah imbalannya, yang berarti bahwa pada saat jatuh

¹¹⁰ H. R. Daeng Naja, *Hukum Kredit Dan Bank Garansi (The Bankers Hand Book)*, Op. cit., halaman 125-126

tempo dan tidak terjadi tunggakan akan secara otomatis pinjaman menjadi lunas, dengan jangka waktu yang bervariasi, bisa jangka pendek, menengah, bahkan panjang.

- 2) Pinjaman non angsuran, disebut juga dengan pinjaman giro, yaitu pinjaman yang dibayar hanya imbalannya saja yang berarti pada saat jatuh tempo, hutang pokok harus dibayar sekaligus lunas, dengan jangka waktunya tidak lebih dari satu tahun (jangka pendek), tetapi masih dapat diperpanjang untuk jangka waktu satu tahun lagi kedepan.
- 3) Pinjaman regular, yaitu dibayar hanya imbalannya saja setiap bulan, sedangkan hutang pokok dibayar sesuai dengan cara-cara pembayaran proyek yang dibiayai, apakah pembayaran tersebut dilakukan per termin atau secara sekaligus lunas, jangka waktu pinjaman jenis ini harus disesuaikan dengan jangka waktu proyek yang dibiayai ¹¹¹

5. Kewajiban Para Pihak

Para pihak di dalam perjanjian pinjaman uang adalah pihak yang memberikan pinjaman uang yaitu koperasi yang disebut dengan kreditor dan pihak penerima pinjaman uang yang disebut dengan debitor .

Kewajiban Koperasi (Kreditor) :

¹¹¹H. R. Daeng Naja, *Contract Drafting, Op.cit.*, halaman 54-55.

- a. Menyediakan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu kepada debitornya, sebesar berapa yang telah disepakati sebelumnya dalam perjanjian pemberian pinjaman
- b. Melakukan pembinaan terhadap debitornya, baik atas usaha (operasional, manajemen dan keuangan) yang dibiayai dengan pinjaman tersebut maupun atas penggunaan pinjaman yang diberikannya
- c. Melakukan pelaporan-pelaporan yang diwajibkan oleh pemerintah, khususnya yang berkenaan dengan pengelolaan pinjaman yang sehat.¹¹²

Kewajiban Nasabah (Debitor) :

- a. Membayar kembali hutang pokok kepada koperasi setelah jangka waktu tertentu yang telah disepakati sebelumnya dalam perjanjian pemberian pinjaman
- b. Membayar imbalan atas hutang pokok tersebut sebesar berapa yang telah disepakati sebelumnya dalam perjanjian pemberian pinjaman.¹¹³

E. Perjanjian Pinjaman Uang

1. Pengertian Perjanjian Pinjaman Uang

Perjanjian Pinjaman Uang dalam bentuk tertulis tidak diatur secara jelas di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan Peraturan Pemerintah Republik

¹¹² *Ibid.*, halaman 55-56.

¹¹³ *Ibid.*, halaman 56.

Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, sehingga pembuatan Perjanjian Pinjaman Uang secara tertulis adalah berdasarkan penafsiran di dalam penjelasan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, tentang adanya kewajiban penandatanganan oleh sekurang-kurangnya ketua dan sekretaris masing-masing koperasi, untuk sahnya perjanjian kerjasama koperasi dengan koperasi lain dan atau anggotanya. Dengan adanya penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut, mengandung makna bahwa perjanjian kerjasama koperasi dengan koperasi dan atau anggotanya dibuat dalam bentuk tertulis, sehingga pembuatan Perjanjian Pinjaman Uang dalam bentuk tertulis yang telah dilaksanakan berdasarkan kebiasaan di lingkungan koperasi dapat kita tafsirkan dari ketentuan penjelasan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi tersebut.

Sebelum perjanjian dibuat, pemberi pinjaman harus memberikan keterangan tertentu kepada peminjam dengan cara yang ditetapkan. Peraturan-peraturan yang meliputi ini mungkin akan memerlukan pemberitahuan secara tertulis tentang harga

tunai dan harga kredit. Perjanjian pinjaman uang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Perjanjian itu harus tertulis, ditandatangani oleh debitor secara pribadi dan oleh atau atas nama kreditor. Tanda tangan dalam bentuk blanko, meninggalkannya pada seorang leveransir atau agen untuk diisi secara terperinci, tidaklah cukup
- b. Dokumen tersebut harus dalam bentuk yang ditetapkan, dan berisi (dalam beberapa hal badan hukum dengan referensi) keterangan yang ditentukan, terutama hak dan kewajiban debitor, perlindungan dan upaya hukum yang tersedia bagiannya menurut undang-undang, dan jumlah pinjaman dan jumlah biaya keseluruhan untuk pinjaman itu
- c. Pemberitahuan tentang hak-hak pembatalan harus diberikan dalam semua perjanjian yang dapat dibatalkan.¹¹⁴

2. Jenis-jenis Perjanjian Pinjaman Uang

Ada 2 jenis perjanjian pinjaman uang, yaitu :

- a. Perjanjian pinjaman uang yang dibuat di bawah tangan/akta di bawah tangan, yaitu perjanjian pemberian pinjaman uang oleh koperasi kepada nasabahnya yang hanya dibuat diantara mereka (kreditor dan debitor) tanpa notaris
- b. Perjanjian pinjaman uang yang dibuat dihadapan notaris/akta otentik, yaitu perjanjian pemberian pinjaman uang oleh koperasi

¹¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian, Op. cit.*, halaman 303.

kepada nasabahnya yang hanya dibuat oleh/dihadapan notaries¹¹⁵

3. Komposisi Perjanjian Pinjaman uang

Perjanjian pinjaman uang dibuat dengan 4 komposisi dasar, yaitu :

- a. Judul perjanjian adalah mutlak adanya, bahwa setiap orang yang berkepentingan melihat akan dengan mudah mengerti bahwa akta yang mereka lihat adalah suatu akta perjanjian pinjaman uang
- b. Komparisi adalah bagian dari suatu akta yang memuat keterangan tentang orang atau pihak yang bertindak mengadakan perbuatan hukum, meliputi :
 - 1). Uraian identitas
 - 2). Dasar hukum yang memberi kewajiban yuridis untuk bertindak dari para pihak
 - 3). Kedudukan para pihak
- c. Isi perjanjian adalah bagian dari perjanjian pinjaman uang yang di dalamnya dimuat hal-hal yang diperjanjikan para pihak

¹¹⁵ H. R. Daeng Naja, *Hukum Kredit Dan Bank Garansi (The Bankerrs Hand Book)*, Op. cit., halaman 184.

- d. Penutup merupakan pilihan domisili hukum para pihak, tempat dan tanggal perjanjian ditandatangani, tanggal mulai berlakunya perjanjian¹¹⁶

4. Isi Perjanjian Pinjaman Uang

Perjanjian pinjaman uang pada koperasi, memuat serangkaian klausula atau *covenant*, dimana sebagian besar dari klausula tersebut merupakan upaya untuk melindungi pihak kreditor dalam pemberian pinjaman uang. Klausula merupakan serangkaian persyaratan yang diformulasikan dalam upaya pemberian pinjaman uang ditinjau dari aspek financial dan hukum. Dari aspek financial, klausula melindungi koperasi agar dapat menuntut atau menarik kembali dana yang telah diberikan kepada nasabah debitor dalam posisi yang menguntungkan bagi koperasi bila kondisi nasabah debitor tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Sedangkan dari aspek hukum, klausula merupakan sarana untuk melakukan penegakan hukum agar nasabah debitor dapat memenuhi substansi yang telah disepakati di dalam perjanjian pinjaman uang.¹¹⁷

Perjanjian pinjaman uang menurut Mariam Darus Badrul Zaman terdiri atas dua bagian, yaitu :

- a. Perjanjian induk (*hoofdcontrast, mantelcontract*), yaitu yang mengatur hal-hal yang pokok

¹¹⁶ *Ibid.*, halaman 183.

¹¹⁷ Johannes Ibrahim, *Op. cit.*, halaman 58-59.

- b. Perjanjian tambahan (*hulpcontract, algemeene voorwaarden*), menguraikan apa yang terdapat di dalam perjanjian induk.¹¹⁸

Isi perjanjian pinjaman uang harus memenuhi 6 syarat minimal, yaitu :

- a. Jumlah hutang
- b. Besarnya imbalan
- c. Waktu pelunasan hutang
- d. Cara-cara pembayaran
- e. Klausula *opeisbaarheid*, yaitu klausula yang memuat hal-hal mengenai hilangnya kewajiban bertindak atau kehilangan haknya debitor untuk mengurus harta kekayaannya, serta kelalaian debitor untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian pinjaman uang, sehingga debitor harus membayar secara seketika dan sekaligus lunas
- f. Barang jaminan¹¹⁹

5. Pengakuan Hutang

Kreditor dalam memberikan pinjaman selain membuat perjanjian pemberian pinjaman juga ada yang membuat suatu pengikatan, yaitu pengakuan hutang dari debitor, yang dimaksudkan agar dapat lebih memudahkan dalam melakukan eksekusi dengan berdasarkan grosse akta pengakuan hutang. Grosse akta bukan pada perjanjian kredit, melainkan pada

¹¹⁸ *Ibid.*, halaman 53.

¹¹⁹ H. R. Daeng Naja, Hukum Kredit Dan Bank Garansi (The Bankers Hand Book), halaman 189-190.

pengakuan hutang. Pengakuan hutang adalah pernyataan sepihak oleh debitor mengenai pinjamannya kepada kreditor. Yang perlu diperhatikan dalam pengakuan hutang ini adalah :

- a. Akta pengakuan hutang harus dibuat secara notariil (akta autentik), agar dapat dimintakan grosse-nya, karena yang dapat dimintakan grosse-nya adalah akta pengakuan hutang yang dibuat secara notariil bukan akta perjanjian pinjaman
- b. Akta pengakuan hutang dibuat bukan merupakan perjanjian assesoir dari akta perjanjian kredit atau perjanjian lainnya yang telah dibuat sebelumnya, juga seyogyanya tidak memiliki perjanjian assesoir, atau dengan kata lain akta pengakuan hutang harus berdiri sendiri
- c. Akta pengakuan hutang dibuat tanpa memuat syarat-syarat seperti akta perjanjian kredit. Artinya, syarat-syarat atau *term condition* pemberian pinjaman kepada debitor dapat dimuat dalam akta perjanjian pinjaman, tetapi untuk akta pengakuan hutang tidak lagi memuat syarat-syarat atau *term condition*
- d. Jumlah pinjaman dalam akta pengakuan hutang harus pasti dan tidak menimbulkan berbagai interpretasi jumlah yang beragam sehingga dapat dengan mudah ditentukan jumlahnya pada saat eksekusi.¹²⁰

6. Jaminan Pinjaman Uang

¹²⁰ *Ibid.*, halaman 201-203.

a. Pengertian Jaminan Pinjaman Uang

Risiko pemberian pinjaman uang dikurangi dengan adanya jaminan pinjaman uang yang diberikan debitor kepada Koperasi. Pengertian jaminan pinjaman uang secara umum adalah penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu utang.¹²¹

Nilai dan legalitas jaminan yang dikuasai oleh koperasi atau yang disediakan oleh debitor harus cukup untuk menjamin fasilitas pinjaman uang yang diterima nasabah/debitor. Barang-barang yang diterima koperasi harus dikuasai atau diikat secara yuridis, baik berupa akta di bawah tangan maupun akta otentik.¹²²

Jaminan yang baik (ideal) yang diberikan dalam pinjaman uang menurut R. Subekti, adalah :

- 1) Yang dapat secara mudah membantu perolehan pinjaman itu oleh pihak yang memerlukannya
- 2) Yang tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari pinjaman untuk melakukan (meneruskan) usahanya
- 3) Yang memberikan kepastian kepada si pemberi pinjaman, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, yaitu apabila perlu dapat mudah diuangkan

¹²¹ Thomas Suyatno, dkk., *Op. cit.*, halaman 88

¹²² *Ibid.* .

untuk melunasi pinjamannya si penerima (pengambil) pinjaman.¹²³

b. Syarat-Syarat Jaminan Pinjaman Uang :

Kartini Muljadi dalam Rachmadi Usman mengatakan bahwa jaminan ideal yang secara maksimal dapat menjamin bahwa kreditor dapat menerima kembali uang yang dipinjamkannya harus memenuhi semua syarat sebagai berikut :

- 1) Tidak menyusahkan debitor dalam melakukan usahanya, sehingga memungkinkan debitor membayar kembali utangnya
- 2) Mudah diidentifikasi
- 3) Setiap waktu tersedia untuk dieksekusi
- 4) Nilai yang tidak mudah merosot
- 5) Mudah direalisasikan sehingga kreditor dapat menerima dananya untuk melunasi pinjaman
- 6) Mudah diketahui oleh pihak lain supaya tidak ada jaminan kedua dipasang atas agunan yang sama kecuali dengan sepengetahuan atau sepersetujuan pemegang jaminan
- 7) Tidak mahal untuk membuatnya dan untuk merealisasikan.¹²⁴

¹²³ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), halaman 70.

c. Kegunaan Jaminan Pinjaman Uang

Pinjaman uang pada koperasi disertai dengan pemberian jaminan oleh debitor kepada koperasi, yang digunakan untuk :

- 1) Memberikan hak dan kekuasaan kepada koperasi untuk mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan barang-barang jaminan tersebut, apabila nasabah melakukan cidera janji, yaitu tidak membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian
- 2) Menjamin agar nasabah berperan serta di dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya, dapat dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk dapat berbuat demikian diperkecil terjadinya
- 3) Memberi dorongan kepada debitor untuk memenuhi perjanjian pinjaman uang. Khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah

¹²⁴ *Ibid.*, halaman xi.

disetujui agar ia tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminan kepada koperasi.¹²⁵

d. Pengikatan Jaminan Pinjaman Uang

Jaminan yang diberikan debitor kepada koperasi dalam rangka memperoleh pinjaman, dapat dilakukan pengikatan jaminan dengan :

- 1) Hak Tanggungan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang dimaksud dengan Hak Tanggungan disini adalah Hak Tanggungan yang obyeknya menyangkut masalah tanah saja, hal ini karena berhubungan dengan Undang-Undang Pokok Agraria yang merupakan dasar hukumnya. Pasal 51 UUPA menyebutkan, bahwa Hak Tanggungan dapat dibebankan pada Hak Milik, Hak Guna Usaha, dan Hak Guna Bangunan.
- 2) Gadai/*pand* adalah hak yang diperoleh koperasi atas suatu benda bergerak (yang diserahkan oleh debitor), untuk mengambil alih benda tersebut guna melunasi piutangnya kepada debitor yang menyerahkan hak tersebut. Benda

¹²⁵ Thomas Suyatno, dkk., *Op. cit.*, halaman 88.

bergerak yang dapat menjadi obyek gadai adalah barang bergerak fisik dan benda bergerak non fisik, yaitu piutang

- 3) Fidusia, adalah penyerahan hak milik atas suatu benda (misalnya persediaan barang) dari debitor pihak ketiga kepada Koperasi untuk dipergunakan sebagai jaminan pinjaman uang
- 4) Cessie, adalah penyerahan atau pelimpahan hak atas piutang debitor kepada Koperasi. Dengan pelimpahan hak tersebut, maka Koperasi mempunyai hak menagih kepada pengutang lama. Pelimpahan piutang tersebut harus diberitahukan kepada pihak pengutang
- 5) Borgtocht adalah suatu persetujuan dari pihak ketiga bahwa mereka menyanggupi untuk melunasi pinjaman uang yang terutang, apabila debitor asli tidak melunasinya¹²⁶

¹²⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis, Op. cit.*, halaman 92-104.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Baku Pada Perjanjian Pinjaman Uang Di Koperasi Nusa Indah Kendal

1. Pengertian Perjanjian Pinjaman Uang Pada Koperasi Nusa Indah Kendal

Koperasi Nusa Indah Kendal bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Tahun 1945, memberikan pinjaman permodalan kepada anggota dan atau calon anggotanya.¹²⁷

Koperasi Nusa Indah Kendal memberikan pinjaman dengan jaminan (*Secured Loan*), yaitu pinjaman diberikan koperasi kepada debitor dengan meminta pemberian jaminan oleh debitor. Pinjaman diberikan oleh koperasi dalam bentuk pinjaman *installment* maupun pinjaman regular. Pinjaman *installment* merupakan pinjaman angsuran, yaitu pinjaman yang dibayar secara angsuran hutang pokok dan imbalannya, yang berarti pada saat jatuh tempo dan tidak terjadi tunggakan akan secara otomatis pinjaman menjadi lunas, dengan jangka waktu yang bervariasi, bisa jangka pendek, menengah, bahkan panjang. Pinjaman regular merupakan pinjaman dengan pembayaran imbalan setiap bulannya, sedangkan hutang pokok dibayar sesuai kesepakatan dengan debitor.¹²⁸

Pinjaman diberikan oleh koperasi dengan pembuatan perjanjian pinjaman uang dengan judul perjanjian kredit. Perjanjian kredit pada Koperasi Nusa Indah Kendal merupakan persetujuan atau kesepakatan yang dilakukan oleh koperasi sebagai pemilik dana untuk dipinjamkan kepada pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu

¹²⁷ Ibu Setiyawati, *Wawancara*, Manajer Koperasi Nusa Indah Kendal, tanggal 8 Desember 2010

¹²⁸ *Ibid.* .

dengan pembayaran sejumlah imbalan sebagaimana yang telah disetujui bersama.¹²⁹

Pinjaman yang diberikan koperasi menurut penulis adalah sesuai dengan ketentuan pengertian pinjaman yang diatur di dalam pasal 1 ayat 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan pinjam Oleh Koperasi yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pembayaran sejumlah imbalan.

Perjanjian kredit pada Koperasi Nusa Indah Kendal, dapat penulis rumuskan menjadi beberapa unsur, yaitu :

- a. Adanya subyek perjanjian yang terdiri atas pemberi pinjaman yaitu koperasi sebagai Pihak Kreditor dan pihak penerima pinjaman sebagai Pihak Debitornya
- b. Adanya persetujuan para pihak mengenai syarat-syarat dan objek perjanjian
- c. Adanya tujuan yang hendak dicapai, yaitu untuk dapat terlaksananya kegiatan usaha dan diperolehnya keuntungan

¹²⁹ *Ibid.* .

oleh pihak debitor serta dikembalikannya pinjaman kepada kreditor dengan pemberian sejumlah imbalan

- d. Adanya prestasi yang akan dilaksanakan, yang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak sesuai syarat-syarat perjanjian, berupa pinjaman dan imbalan atas pinjaman tersebut
- e. Perjanjian kredit dibuat dalam bentuk tertulis, sehingga mempunyai kekuatan mengikat dan kekuatan bukti untuk dapat dilaksanakannya akad oleh para pihak
- f. Adanya syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban para pihak, yang terdiri atas syarat pokok yang menimbulkan hak dan kewajiban pokok, seperti jumlah pinjaman, dan juga syarat pelengkap atau tambahan, misalnya tentang tata cara pembayaran.

Perjanjian kredit yang dilakukan Koperasi Nusa Indah dengan debitornya, menurut penulis telah memenuhi syarat-syarat sah untuk terjadinya perjanjian yang terdapat di dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu :

- a. Dilakukan dengan kesepakatan kreditor dan debitor untuk saling mengikatkan diri untuk membuat kerjasama pinjam meminjam
- b. Kreditor dan debitor cakap untuk membuat perikatan
- c. Adanya suatu hal tertentu, yaitu pinjaman dalam bentuk uang, dimana kreditor memberikan pinjaman kepada debitor dan

debitor membayar kembali pinjaman disertai pembayaran imbalan kepada kreditor

- d. Perjanjian kredit dilakukan dengan sebab yang halal, yaitu perjanjian kredit dilakukan untuk memberikan bantuan permodalan kepada debitor dengan mendapatkan imbalan dari pinjaman yang diberikan.

Perjanjian kredit pada Koperasi Nusa Indah Kendal merupakan suatu perjanjian yang telah dibakukan dalam bentuk formulir tertentu, yaitu perjanjian yang hampir seluruh klausulanya telah ditentukan secara sepihak oleh Pihak Koperasi Nusa Indah Kendal sebagai pihak kreditor dan pihak lain yaitu pihak debitor tidak diberikan peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan terhadap isi perjanjian, sedangkan yang belum dibakukan hanya beberapa hal tertentu seperti tanggal, identitas kreditor, identitas debitor, jumlah pinjaman, jumlah imbalan, jangka waktu pembayaran, tata cara pembayaran, jumlah biaya yang harus dikeluarkan debitor untuk terjadinya pinjaman, jaminan yang diberikan debitor kepada kreditor. Debitor hanya mempunyai pilihan menerima perjanjian tersebut, yang berarti debitor menyetujui isi perjanjian yang diberikan dan mendapat bantuan permodalan dalam bentuk pinjaman, atau debitor tidak menerima isi perjanjian

tersebut dalam arti debitor tidak mendapatkan pinjaman dari kreditor.¹³⁰

Penulis menyimpulkan Perjanjian Kredit pada Koperasi Nusa Indah Kendal sebagai perikatan, karena perjanjian pinjaman uang pada Koperasi Nusa Indah Kendal dilakukan dalam bidang harta kekayaan, yang di dalamnya terdapat prestasi dan kontraprestasi yang berupa uang, sehingga perjanjian pinjaman uang menimbulkan hak dan kewajiban para pihak untuk melaksanakan kewajibannya masing-masing.

2. Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman Uang Pada Koperasi Nusa Indah Kendal

Pelaksanaan perjanjian merupakan realisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan para pihak agar dapat mencapai tujuan perjanjian, sebab suatu tujuan tidak akan terwujud tanpa pelaksanaan perjanjian itu sendiri, sehingga masing-masing pihak harus dapat melaksanakan perjanjian sebagaimana yang telah disetujui untuk dilaksanakan. Pelaksanaan perjanjian pada dasarnya menyangkut masalah pembayaran yang meliputi persoalan pihak yang melakukan pembayaran; alat bayar yang digunakan apakah berupa uang, cek, atau wesel; tempat pembayaran dilakukan; media pembayaran yang digunakan; biaya penyelenggaraan pembayaran

¹³⁰ Ibu Setiyawati, *Loc. cit.* .

dan penyerahan barang yang menjadi objek perjanjian.¹³¹ Namun apabila ditinjau lebih jauh tentang pelaksanaan perjanjian adalah meliputi keseluruhan prosedur perjanjian yang dimulai dari pembuatan perjanjian, saat berlakunya perjanjian, serta berakhirnya perjanjian yang dibuat.

Perjanjian pinjaman uang dapat terjadi dengan adanya penawaran dari pihak koperasi kepada calon debitur ataupun debitur datang sendiri ke koperasi untuk mengajukan permohonan pembiayaan.¹³²

Pinjaman dapat diajukan oleh anggota koperasi maupun oleh calon anggota koperasi. Yang dapat menjadi anggota koperasi Nusa Indah Kendal adalah :

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Berpenghasilan tetap, dengan mata pencaharian sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, pedagang, wira usaha, petani, yang berdomisili di Kabupaten Kendal
- c. Mengajukan permohonan menjadi anggota koperasi
- d. Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan perbuatan hukum (wenang dan cakap hukum)
- e. Menyetujui isi Anggaran Dasar Koperasi, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Rapat Anggota Tahunan, dan peraturan lain yang berlaku di koperasi

¹³¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, *Op. cit.*, halaman 102-106.

¹³² Ibu Setiyawati, *Op. cit.*, tanggal 8 Desember 2010.

f. Telah melunasi Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib¹³³

Permohonan pinjaman dapat dilakukan oleh anggota ataupun calon anggota koperasi dengan melampirkan beberapa persyaratan, dimana persyaratan yang diserahkan dengan meperlihatkan aslinya, yaitu :

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk suami dan isteri
- b. Foto copy Kartu Keluarga
- c. Foto copy Surat Nikah
- d. Foto copy surat kepemilikan jaminan. Jaminan berupa tanah maka pemohon menyerahkan foto copy Sertifikat Hak Milik dan surat pajak. Agunan berupa kendaraan bermotor maka pemohon menyerahkan foto copy Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).¹³⁴

Pinjaman diberikan oleh koperasi untuk memberikan bantuan permodalan kepada anggotanya guna menjalankan usaha atau proyek yang disepakati. Anggota bertindak sebagai pengelola usaha dan koperasi bertindak sebagai mitra atau dapat pula sebagai pengelola usaha berdasarkan kesepakatan.¹³⁵

Setelah semua persyaratan diajukan oleh pemohon pinjaman, maka selanjutnya pihak koperasi akan melakukan proses pengecekan terhadap kegiatan usaha pemohon pinjaman.

¹³³ *Ibid.* .

¹³⁴ *Ibid.* .

¹³⁵ *Ibid.*, tanggal 15 Desember 2010.

Pengecekan dilakukan secara menyeluruh dengan pengecekan secara fisik kegiatan usaha, tempat usaha, agunan yang akan diberikan, serta melakukan survey lapangan. Setelah koperasi mendapatkan keyakinan atas kegiatan usaha pemohon pinjaman, maka petugas pinjaman akan membuat proposal permohonan pinjaman.¹³⁶

Proposal permohonan pinjaman diajukan oleh petugas pinjaman kepada pimpinan koperasi yang dalam hal ini dilakukan oleh manajer apabila permohonan pinjaman tidak lebih dari lima juta rupiah dan permohonan pinjaman diajukan kepada komite yang terdiri dari manajer dan pengurus koperasi apabila permohonan pinjaman lebih dari lima juta rupiah.¹³⁷

Pimpinan Koperasi Nusa Indah Kendal dalam memberikan pinjaman memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pemberian pinjaman, disertai pelaksanaan prinsip kesehatan dan prinsip kehati-hatian, untuk memberikan pedoman dalam pemberian pinjaman yang dilakukan oleh koperasi dalam menjaga kesehatan usahanya. Pinjaman yang diberikan koperasi harus berdasarkan keyakinan yang telah diperoleh koperasi atas :

- a. *Character behavior* (karakter ahlakunya), yaitu penilaian terhadap sikap atau perilaku debitor

¹³⁶*Ibid.*, tanggal 22 Desember 2010.

¹³⁷*Ibid.* .

- b. *Condition of economy* (kondisi usaha), usaha yang dijalankan calon anggota peminjam harus baik
- c. *Capacity* (kemampuan manajerial), yaitu kemampuan manajerial, handal, dan tangguh dalam menjalankan usaha
- d. *Capital* (modal debitor), calon anggota peminjam harus mampu mengatur keuangannya dengan baik
- e. *Collateral* (jaminan), sebagai pengganti pelunasan pinjaman apabila nasabah sudah tidak mampu lagi membayar kembali pinjaman yang telah diperolehnya, serta sebagai pelunasan pinjaman, apabila anggotanya melakukan tindakan wanprestasi
- f. *Constrain* (keadaan yang menghambat), ketepatan pemberian modal usaha sangat berkaitan pula dengan iklim/musim suatu usaha tertentu.¹³⁸

Apabila pimpinan koperasi telah memperoleh keyakinan atas kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman, maka pimpinan koperasi akan membuat suatu keputusan permohonan pinjaman berupa :

- a. Persetujuan pinjaman tanpa perubahan jumlah pinjaman
- b. Persetujuan pinjaman dengan perubahan jumlah pinjaman
- c. Penolakan permohonan pinjaman¹³⁹

¹³⁸ *Ibid.* .

¹³⁹ *Ibid.* .

Persetujuan pimpinan koperasi atas permohonan pinjaman dimasukkan ke dalam bagian administrasi untuk diproses lebih lanjut kepada pemohon pinjaman.¹⁴⁰

Pemohon pinjaman yang mendapat persetujuan pinjaman melakukan penandatanganan perjanjian pinjaman uang yang berjudul Perjanjian Kredit dengan Pihak Koperasi Nusa Indah Kendal. Penandatanganan merupakan saat lahirnya perjanjian kredit. Dengan penandatanganan perjanjian kredit, maka sejak saat itu sudah melekat hak dan kewajiban para pihak di dalam perjanjian, sampai berakhirnya perjanjian sesuai jangka waktu dan persyaratan yang telah disepakati di dalam perjanjian.¹⁴¹

Penandatanganan Perjanjian Kredit dilanjutkan dengan dilakukannya pencairan pinjaman di bagian kasir/*teller*. Pencairan pinjaman dapat dilakukan dengan pembayaran tunai kepada debitor maupun dengan memasukkannya ke rekening debitor.¹⁴²

Perjanjian Kredit pada koperasi Nusa Indah Kendal berisi tentang :

- a. Identitas dan kewenangan bertindak para pihak
- b. Jumlah pokok pinjaman
- c. Bentuk pinjaman
- d. Besarnya bunga pinjaman
- e. Besarnya biaya provisi kredit

¹⁴⁰ *Ibid.* .

¹⁴¹ *Ibid.* .

¹⁴² *Ibid.* .

- f. Tata cara pembayaran kembali
- g. Jumlah angsuran perbulan
- h. Jatuh tempo pembayaran angsuran perbulan
- i. Tenggang waktu pembayaran angsuran
- j. Ketentuan denda terhadap keterlambatan pembayaran
- k. Ketentuan pembayaran seketika dan sekaligus lunas dengan melepaskan ketentuan pasal 1266 KUHPerdara
- l. Jaminan pinjaman dan pengikatannya
- m. Kekuasaan kreditor menjual jaminan
- n. Domisili dan pilihan hukum
- o. Tempat, tanggal dan tanda tangan para pihak dalam perjanjian kredit beserta saksi-saksi¹⁴³

Imbalan yang diterima koperasi di dalam memberikan pinjaman, pada Koperasi Nusa Indah Kendal menggunakan istilah bunga. Imbalan/bunga diberikan oleh debitor sebesar 1,95% terhadap pinjaman yang membayar angsuran secara bulanan dan bunga berupa jasa sebesar 3% selama jangka waktu panen bagi petani dengan pokok pinjaman dibayar di belakang pada saat panen. Besarnya imbalan/bunga dicantumkan di dalam perjanjian kredit.¹⁴⁴

Debitor mengakui bahwa pinjaman yang diterima dibebani dengan imbalan 1,95% setiap bulannya, sehingga debitor dalam

¹⁴³ *Ibid.*, tanggal 29 Desember 2010.

¹⁴⁴ *Ibid.* .

membayar angsuran pokok pinjaman juga disertai pembayaran bunga sebesar 1,95 %.¹⁴⁵

Risiko pinjaman dapat dikurangi oleh Pihak Koperasi dengan meminta jaminan dari debitor. Karena jaminan tersebut dapat digunakan oleh pihak koperasi untuk melunasi pembiayaan yang telah diberikan. Koperasi menggunakan jaminan yang diberikan debitor untuk melunasi pinjaman yang telah diberikannya dengan cara menjual jaminan tersebut untuk menutup seluruh kewajibannya dan sisanya akan dikembalikan kepada debitor. Pemberian jaminan debitor kepada kreditor dicantumkan di dalam perjanjian kredit beserta cara pengikatannya.¹⁴⁶

Debitor memberikan jaminan kepada koperasi adalah karena diminta oleh koperasi untuk menyerahkan jaminan guna menjamin pinjaman yang diterima debitor dari koperasi. Debitor menyerahkan jaminan karena debitor beritikad baik untuk melaksanakan perjanjian kredit dan jaminan diberikan debitor untuk memberikan keyakinan terhadap koperasi bahwa debitor akan melaksanakan perjanjian kredit sebagaimana telah disepakati, namun apabila terjadi keadaan tidak diinginkan para pihak dimana debitor tidak melaksanakan perjanjian kredit sebagaimana mestinya, dalam arti debitor tidak melakukan pembayaran angsuran sesuai jangka waktu dan tata cara yang diperjanjikan, maka

¹⁴⁵ Bapak AW., Ibu M., Bapak BL., *Wawancara*, Debitur Koperasi Nusa Indah Kendal, tanggal 29 Desember 2010.

¹⁴⁶ Ibu Setiyawati, *Loc. cit.* .

koperasi dapat mengambil pemenuhan perjanjian dengan menggunakan jaminan sebagai pelunasan pinjaman.¹⁴⁷

Pembayaran kembali pinjaman yang telah diberikan dapat dilakukan secara angsuran maupun pembayaran pada akhir periode perjanjian sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan, dan dicantumkan di dalam perjanjian kredit.¹⁴⁸

Perjanjian kredit dilakukan di bawah tangan diantara para pihak untuk pinjaman sampai dengan jumlah lima juta rupiah, sedangkan terhadap pinjaman diatas lima juta rupiah perjanjian kredit dilakukan diantara para pihak disertai dengan adanya Pengakuan Hutang debitor kepada kreditor yang dibuat oleh dan di hadapan notaris.¹⁴⁹

Koperasi Nusa Indah Kendal berhak melakukan pengawasan terhadap usaha yang dijalankan anggota sebagaimana disepakati dalam perjanjian kredit, tetapi tidak berhak membatasi tindakan pengelola usaha dalam menjalankan usahanya, kecuali apabila menyimpang dari ketentuan perjanjian.¹⁵⁰

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kredit tersebut, maka terdapat beberapa hal yang perlu dikaji lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban para pihak. Apa

¹⁴⁷ Bapak AW., Ibu M., Bapak BL, Loc. cit. .

¹⁴⁸ *Ibid.* .

¹⁴⁹ Ibu Setiyawati, *Loc. cit.* .

¹⁵⁰ *Ibid.* .

yang menjadi hak debitor menjadi kewajiban kreditor dan sebaliknya apa yang menjadi hak kreditor menjadi kewajiban debitor.

Hak debitor dalam perjanjian kredit pada Koperasi Nusa Indah Kendal, diantaranya :

- a. Mendapat bantuan permodalan dalam bentuk pinjaman dari Koperasi Nusa Indah Kendal
- b. Melakukan pembayaran kembali pinjaman yang telah diterimanya kepada kreditor beserta pembayaran imbalan/bunga dengan cara angsuran
- c. Dilakukan pengakhiran perjanjian kredit apabila sudah membayar seluruh pinjaman beserta kewajiban yang menyertainya

Perjanjian kredit juga memberikan kewajiban kepada debitor untuk :

- a. Membayar seluruh pinjaman yang sudah diterimanya beserta seluruh kewajiban yang menyertainya sesuai dengan tata cara yang telah disepakati di dalam perjanjian kredit
- b. Membayar denda apabila melakukan pembayaran tidak tepat pada waktunya
- c. Menyerahkan jaminan
- d. Memberikan kuasa kepada kreditor untuk mengambil pelunasan atas pinjaman yang sudah diberikan dari jaminan debitor apabila

debitor tidak membayar angsuran sejumlah tiga kali berturut-turut

- e. Memberikan keterangan kepada kreditor atas keadaan perusahaannya
- f. Melaksanakan segala persyaratan di dalam perjanjian kredit

Perjanjian kredit pada Koperasi Nusa Indah Kendal dibuat secara tertulis meskipun tidak ada peraturan yang secara tegas menyebutkan bahwa perjanjian kredit tersebut harus dibuat secara tertulis. Pihak koperasi mengemukakan bahwa pembuatan perjanjian secara tertulis dilakukan dengan menyusun perjanjian kredit oleh koperasi dalam bentuk formulir perjanjian kredit berdasarkan kebiasaan yang berlaku di lingkungan koperasi dan hanya beberapa bagian dari perjanjian kredit yang dikosongkan. Pembuatan perjanjian kredit secara tertulis adalah untuk menjamin kepastian hukum para pihak, karena dapat menghindari terjadinya kecurangan di dalam perjanjian kredit baik mengenai identitas, jumlah pinjaman, jumlah imbalan/bunga, tata cara pembayaran, jangka waktu pembayaran, jaminan/agunan yang diberikan, maupun mengenai hak dan kewajiban para pihak.¹⁵¹

Pembuatan perjanjian kredit secara tertulis juga diakui oleh debitor Koperasi Nusa Indah Kendal. Para debitor menyampaikan bahwa setelah koperasi mengabulkan permohonan pinjaman, maka

¹⁵¹ Ibu Setiyawati, *Op. cit.* .

debitor bersama-sama dengan koperasi menandatangani perjanjian kredit dan sebelumnya diberikan penjelasan tentang ketentuan-ketentuan perjanjian kredit yang telah dibuat oleh pihak koperasi. Debitor merundingkan dengan kreditor mengenai jumlah pinjaman, jumlah imbalan/bunga atau bagi hasil, tata cara pembayaran, jangka waktu pembayaran, jaminan/agunan yang diberikan. Apabila debitor tidak setuju dengan isi perjanjian kredit tersebut, maka debitor tidak dapat melakukan perubahan isi perjanjian kredit, debitor tidak mempunyai pilihan lain kecuali tidak dapat melanjutkan perjanjian kredit, dalam arti debitor tidak mendapatkan pinjaman dari kreditor.¹⁵²

3. Pelaksanaan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Pinjaman Uang Pada Koperasi Nusa Indah Kendal

Perjanjian pinjaman uang pada Koperasi Nusa Indah Kendal yang berjudul Perjanjian Kredit dibuat secara tertulis, dimana perjanjian tersebut sudah dibuat dan dipersiapkan terlebih dahulu oleh pihak koperasi dalam bentuk formulir dan hanya bagian tertentu dari perjanjian yang belum diisi, yaitu bagian yang menyangkut identitas, jumlah pinjaman, jumlah imbalan, tata cara pembayaran, jangka waktu pembayaran, dan jaminan yang diberikan.¹⁵³

¹⁵² Bapak AW., Ibu M., Bapak BL., *Loc. cit.* .

¹⁵³ Ibu Setiyawati, *Loc. cit.* .

Penulis berpendapat bahwa bentuk perjanjian kredit tersebut merupakan perjanjian baku atau standar kontrak karena perjanjian tersebut sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh kreditor dalam bentuk formulir dan kepada debitor tidak diberikan kesempatan untuk merundingkan isi perjanjian tersebut, hanya bagian-bagian tertentu yang menyangkut jenis, harga, jumlah, tempat, waktu, dan beberapa hal yang spesifik dari objek perjanjian saja yang belum dibakukan.

Penulis menyimpulkan bahwa yang dibakukan bukanlah formulir perjanjiannya, tetapi klausula-klausulanya. Perjanjian kredit merupakan perjanjian baku sepihak, karena isi dan bentuk perjanjian ditentukan secara sepihak oleh pihak koperasi yang dalam hal ini memiliki kedudukan ekonomi lebih kuat dibandingkan dengan pihak debitor, karena pihak koperasi sebagai kreditor adalah pihak yang dianggap mempunyai permodalan yang lebih kuat daripada pihak debitor, sehingga dapat dikatakan bahwa dalam perjanjian baku kedudukan para pihak dalam perjanjian tidak seimbang, yaitu satu pihak pada posisi kuat dan pihak lainnya pada posisi lemah. Kedudukan para pihak yang tidak seimbang menyebabkan pihak yang posisi ekonominya lemah menjadi tidak mempunyai pilihan lain kecuali menerima atau menolak perjanjian tersebut, sebagaimana pendapat Vera Bolger dalam Mariam Darus Badruzaman menamakannya *take it or leave it contract*, jika

debitor menyetujui salah satu syarat-syarat, maka debitor mungkin hanya bersikap menerima atau tidak menerimanya sama sekali, kemungkinan untuk mengadakan perubahan itu sama sekali tidak ada.¹⁵⁴

Penulis mengambil dari pengertian perjanjian baku yang dikemukakan oleh Sutan Remy Sjahdeini yang mengartikan perjanjian baku sebagai perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Adapun yang belum dibakukan hanya beberapa hal, misalnya yang menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu, dan beberapa hal yang spesifik dari objek yang diperjanjikan. Sjahdeini menekankan, yang dibakukan bukan formulir perjanjian tersebut, melainkan klausul-klausulnya.¹⁵⁵

Perjanjian kredit pada Koperasi Nusa Indah Kendal menurut penulis telah memuat komposisi dasar suatu perjanjian, yaitu :

- a. Judul perjanjian : “PERJANJIAN KREDIT”
- b. Komparisi Perjanjian, merupakan bagian dari perjanjian kredit yang menguraikan keterangan tentang orang atau pihak yang bertindak mengadakan perbuatan hukum, yaitu :
 - 1) Uraian identitas para pihak di dalam perjanjian

¹⁵⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis, Op.cit.*, halaman 46.

¹⁵⁵ Sutan Remy Syahdeini, *Op. cit.*, halaman 66.

- 2) Dasar hukum yang memberi kewajiban bertindak dari para pihak
- c. Isi perjanjian, berupa syarat-syarat perjanjian, hak dan kewajiban para pihak
- d. Penutup perjanjian, berupa tempat dan tanggal perjanjian ditandatangani. Di dalam penutup perjanjian kredit sudah dimuat domisili dan pilihan hukum para pihak, yang dicantumkan dalam suatu perjanjian agar tidak timbul permasalahan dalam penyelesaian sengketa hukum yang mungkin dapat terjadi

Perjanjian kredit Pada koperasi Nusa Indah Kendal dapat penulis temukan tentang adanya klausula yang berisi pembatasan, pembebasan, maupun rekayasa terhadap tanggung jawab pihak kreditor terhadap pihak debitor atas kewajiban yang mesti ditanggungnya atau yang disebut dengan klausula eksonerasi.

Klausula eksonerasi di dalam perjanjian kredit dapat penulis temukan di dalam Pasal 1, Pasal 7 dan Pasal 11 ayat 2 Perjanjian Kredit Nusa Indah Kendal.

Pasal 1 Perjanjian Kredit Koperasi Nusa Indah Kendal berbunyi :

“Koperasi telah memberikan kepada debitor : fasilitas yang selalu dapat ditarik kembali ...”

Pasal 7 Perjanjian Pinjaman Uang Koperasi Nusa Indah Kendal berbunyi :

“KOPERASI berhak menentukan jumlah piutangnya terhadap DEBITOR baik hutang yang timbul karena perjanjian ini dan/atau oleh sebab apapun juga termasuk perhitungan bunga, provisi, biaya penyusulan, penagihan, biaya atas barang jaminan dan biaya-biaya lainnya yang diakibatkan oleh perjanjian ini baik yang telah maupun yang belum dibayar/diperhitungkan oleh KOPERASI. Dalam hal demikian, DEBITOR berjanji dan karenanya mengikat diri untuk membayar seluruhnya secara tunai dan seketika dan dalam waktu 3 (tiga) hari sejak tanggal pemberitahuan pertama oleh KOPERASI. Untuk itu DEBITOR melepaskan haknya yang tercantum dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.”

Ketentuan Pasal 11 ayat 2 Perjanjian Pinjaman Uang

Koperasi Nusa Indah Kendal berbunyi sebagai berikut :

“Segala kuasa-kuasa yang diberikan oleh DEBITOR dan atau PENJAMIN kepada KOPERASI dalam perjanjian ini tetap berlaku dan tidak dapat dicabut kembali serta tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang tercantum dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.”

Pasal 1 Perjanjian Kredit tersebut merupakan klausula eksonerasi, karena klausula tersebut merupakan pembebasan tanggung jawab kreditor atas tindakannya yang berupa menolak penggunaan selanjutnya atas kredit itu oleh nasabah debitor tanpa ada alasan untuk itu, meskipun klausula tersebut bukan merupakan ketentuan yang membebaskan atau membatasi tanggung jawab koperasi terhadap gugatan nasabah debitor.

Pasal 7 dan Pasal 11 ayat 2 Perjanjian Pinjaman Uang Koperasi Nusa Indah Kendal menurut penulis merupakan klausula eksonerasi, karena Pasal 7 Perjanjian Pinjaman Uang Koperasi

Nusa Indah Kendal merupakan pembatasan berlakunya syarat batal di dalam pasal 1266 KUHPerdara, sedangkan Pasal 11 ayat 2 Perjanjian Pinjaman Uang Koperasi Nusa Indah Kendal merupakan pembatasan berakhirnya pemberian kuasa di dalam pasal 1813 KUHPerdara. Penulis berpendapat bahwa sebaiknya klausula tersebut tidak dicantumkan.

Klausula eksonerasi yang dirumuskan oleh koperasi tidak menjadikan perjanjian tersebut batal demi hukum atau dapat dibatalkan, sebagaimana pendapat Purwahid Patrik,¹⁵⁶ karena klausula tersebut :

- a. Tidak bertentangan dengan kesusilaan sehingga tidak batal demi hukum
- b. Dibuat dengan tidak menyalahgunakan keadaan sehingga perjanjian tersebut tidak dapat dibatalkan
- c. Sudah diberitahukan secara pantas kepada debitor, dan pencantumannya jelas

Klausula eksonerasi yang tercantum di dalam Pasal 7 dan Pasal 11 Perjanjian Kredit Koperasi Nusa Indah Kendal, menurut penulis bertentangan dari ketentuan pencantuman klausula baku di dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, karena klausula eksonerasi dalam Perjanjian Kredit tersebut merupakan klausula yang

¹⁵⁶ Purwahid Patrik, *Asas Itikad Baik Dan Kepatutan Dalam Perjanjian*, *Op.cit.*, halaman 47.

pengungkapannya sulit dimengerti, yaitu orang yang tidak mengerti peraturan hukum atau masalah hukum, tidak dapat memahami ketentuan Pasal 7 dan Pasal 11 Perjanjian Kredit tersebut, karena terdapatnya pencantuman ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya Pasal 1266 dan Pasal 1813 KUHPerdata, tanpa ada pencantuman bunyi pasal tersebut secara jelas, sehingga tidak setiap orang dapat mengerti ketentuan Perjanjian Kredit, hanya orang-orang tertentu yang mengerti ketentuan hukum yang dapat memahaminya, sehingga dapat dikatakan bahwa klausula tersebut merupakan klausula yang sulit pengungkapannya. Penulis berpendapat agar klausula-klausula di dalam Perjanjian Kredit dibuat dengan klausula yang mudah dipahami dan tidak merugikan para pihak serta disesuaikan lagi dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, agar Perjanjian Kredit tidak batal demi hukum.

Koperasi Nusa Indah Kendal menerangkan bahwa terhadap pinjaman dalam jumlah lima juta rupiah, maka selain dibuat perjanjian pembiayaan secara di bawah tangan juga dibuat pengakuan hutang debitor kepada koperasi secara notariil. Pengakuan hutang yang di buat di hadapan notaris dimaksudkan untuk menjadi alat bukti yang mempunyai kekuatan eksekusi seperti putusan pengadilan yang tetap, sehingga memudahkan

pihak koperasi dalam melakukan eksekusi jaminan apabila debitor melakukan ingkar janji.¹⁵⁷

Penulis berpendapat bahwa Pengakuan Hutang dari debitor kepada kreditor, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris dalam bentuk akta autentik, terhadap pinjaman yang diberikan kreditor terhadap debitor dalam jumlah yang lebih dari lima juta rupiah, setelah dibuatnya perjanjian kredit secara di bawah tangan diantara para pihak, adalah telah sesuai dengan maksud dibuatnya Pengakuan Hutang untuk lebih memudahkan dalam melakukan eksekusi dengan berdasarkan grosse akta pengakuan hutang. Grosse akta bukan pada perjanjian kredit, melainkan pada pengakuan hutang. Pengakuan hutang adalah pernyataan sepihak oleh debitor mengenai pinjamannya kepada kreditor. Berdasarkan keterangan koperasi, penulis menyimpulkan bahwa :

- a. Akta pengakuan hutang koperasi telah dibuat secara notariil (akta autentik), agar dapat dimintakan grosse-nya, karena yang dapat dimintakan grosse-nya adalah akta pengakuan hutang yang dibuat secara notariil bukan akta perjanjian kredit
- b. Akta pengakuan hutang dibuat bukan merupakan perjanjian assesoir dari akta perjanjian kredit, tidak memiliki perjanjian assesoir, atau dengan kata lain akta pengakuan hutang berdiri sendiri

¹⁵⁷ Ibu Setiyawati, *Loc. cit.* .

- c. Akta pengakuan hutang dibuat tanpa memuat syarat-syarat seperti akta perjanjian kredit, hanya pernyataan hutang debitor kepada koperasi
- d. Jumlah pinjaman dalam akta pengakuan hutang sudah pasti dan tidak menimbulkan berbagai interpretasi jumlah yang beragam sehingga dapat dengan mudah ditentukan jumlahnya pada saat eksekusi.

Asas kebebasan berkontrak (*partij otonomi*), yaitu bahwa setiap orang bebas membuat Perjanjian, baik yang terdapat dalam KUH Perdata (perjanjian bernama/*benoemd/nominaat*) maupun yang tidak terdapat di dalam KUH Perdata (perjanjian tidak bernama/*onbenoemde overeenkomst/innominaat*). Asas kebebasan berkontrak disimpulkan dari ketentuan pasal 1338 KUH Perdata, yaitu :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Perkataan semua perjanjian dalam pasal 1338 KUHPerdata tersebut menunjukkan bahwa setiap orang bebas membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas membuat perjanjian dalam bentuk dan isinya, serta setiap orang bebas membuat perjanjian dengan siapapun. Akan tetapi kebebasan pihak-pihak dalam perjanjian dibatasi oleh undang-undang,

kesusilaan baik dan ketertiban umum, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1337 KUH Perdata.

Penerapan ruang lingkup asas kebebasan berkontrak terhadap perjanjian kredit pada koperasi, meliputi : ¹⁵⁸

a. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian

Para pihak di dalam perjanjian kredit adalah para pihak yang berkehendak bebas membuat perjanjian kredit. Pihak debitor hanya memberikan penawaran pemberian pinjaman kepada debitor atau debitor datang sendiri meminta bantuan permodalan dalam bentuk pinjaman kepada kreditor. Kreditor tidak memaksa debitor untuk membuat perjanjian kredit, namun perjanjian tersebut terjadi dengan keinginan bebas dari para pihak.

b. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian

Kreditor hanya menyediakan bantuan permodalan dalam bentuk pinjaman. Kreditor tidak memaksa debitor untuk membuat perjanjian kredit dengannya. Debitor dengan kesadaran sendiri meminta dibuatnya perjanjian kredit dengan kreditor karena kebutuhan debitor yang memerlukan bantuan permodalan dari kreditor.

¹⁵⁸ Agus Yudha Hernoko, *Op. cit.*, halaman 95-96.

- c. Kebebasan untuk menentukan atau memilih sebab dari perjanjian yang akan dibuatnya

Perjanjian kredit dilaksanakan dengan sebab untuk memperoleh bantuan permodalan dalam bentuk pinjaman dari kreditor kepada debitor. Kreditor membuat perjanjian untuk memberikan pinjaman dan debitor membuat perjanjian untuk menerima pinjaman.

- d. Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian

Perjanjian kredit dilakukan kreditor dan debitor dengan tujuan dilaksanakannya objek perjanjian berupa prestasi dan kontraprestasi dalam bentuk pinjaman dalam bentuk uang dan imbalan/bunga.

- e. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian

Perjanjian kredit dibuat dalam bentuk tertulis. Perjanjian kredit telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh pihak kreditor dalam bentuk formulir dan kepada debitor tidak diberikan kesempatan untuk menentukan isi perjanjian, hanya bagian-bagian tertentu saja dari perjanjian yang belum diisi. Bentuk perjanjian kredit dibuat secara baku yang disebut standar kontrak.

- f. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullend optional*)

Di dalam perjanjian kredit tidak mencantumkan klausula yang menyatakan penerimaan atau penyimpangan ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.

Penulis berpendapat bahwa ruang lingkup kebebasan berkontrak tidak semuanya dapat terpenuhi. Kebebasan para pihak untuk menentukan bentuk suatu perjanjian tidak dapat dilaksanakan di dalam perjanjian kredit, karena perjanjian kredit sudah dipersiapkan secara massal dalam bentuk formulir tertentu yang disebut perjanjian baku atau standar kontrak. Perjanjian kredit telah dipersiapkan oleh pihak kreditor untuk ditandatangani dengan pihak debitor. Syarat-syarat perjanjian telah ditentukan secara sepihak oleh pihak kreditor, kepada debitor tidak diberikan kesempatan untuk merundingkan atau menentukan isi perjanjian tersebut, hanya bagian tertentu perjanjian yang menyangkut identitas, jumlah, waktu, tempat, dan beberapa hal spesifik dari objek perjanjian yang masih dikosongkan.

Debitor dalam perjanjian kredit tidak mempunyai pilihan lain, kecuali menerima isi perjanjian dalam artian debitor akan mendapatkan bantuan permodalan dalam bentuk pinjaman dari pihak kreditor, ataukah menolak isi perjanjian dalam artian debitor tidak akan mendapatkan bantuan permodalan dalam bentuk pinjaman dari kreditor.¹⁵⁹ Keadaan debitor dalam perjanjian kredit

¹⁵⁹ Bapak AW., Ibu M., Bapak BL., *Loc. cit.* .

tersebut menurut penulis adalah sebagai pihak yang mempunyai posisi keuangan atau posisi ekonomi yang lebih lemah dari kreditor, karena dalam perjanjian kredit ini pihak kreditor adalah pihak yang mempunyai permodalan lebih besar dari debitor. Kreditor merupakan pihak yang mempunyai kedudukan permodalan lebih kuat dari debitor, dengan demikian kreditor sebagai pihak yang mempunyai kedudukan ekonomi lebih kuat dari debitor. Penulis menyimpulkan mengenai posisi debitor dan kreditor dalam perjanjian kredit dengan demikian tidak seimbang.

Penulis berpendapat bahwa asas kebebasan berkontrak dengan demikian belum dilaksanakan secara sempurna di dalam perjanjian kredit, karena tidak terdapatnya kebebasan para pihak di dalam menentukan bentuk dan isi perjanjian. Koperasi sebagai pihak yang mempunyai kedudukan ekonomi lebih kuat dari debitor, menentukan secara sepihak isi perjanjian. Kreditor di dalam membuat perjanjian pinjaman uang dalam bentuk baku adalah karena kebutuhan kecepatan dan ketepatan kerja di dalam pelayanan terhadap debitor. Koperasi merumuskan perjanjian kredit secara baku dimaksudkan untuk memberikan keuntungan bagi koperasi maupun bagi debitor, karena koperasi sebagai pihak yang telah memberikan bantuan permodalan kepada debitor dalam bentuk pinjaman tidak menginginkan terjadinya ingkar janji di dalam pelaksanaan perjanjian. Debitor yang telah mendapatkan

keuntungan dari koperasi dalam bentuk bantuan permodalan berupa pinjaman, yang diharapkannya akan mendapatkan keuntungan berupa hasil dari pinjaman yang telah diterimanya di masa yang akan datang, beritikad baik untuk memenuhi kewajibannya kepada koperasi, sebagaimana yang telah dituangkan di dalam perjanjian. Perumusan perjanjian kredit secara baku adalah untuk melindungi kepentingan koperasi maupun debitor itu sendiri.

Asas kebebasan berkontrak yang belum terlaksana secara sempurna di dalam perjanjian kredit, berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, maka penulis dapat mengetahui bahwa keadaan tersebut tidak menjadikan perjanjian kredit menjadi batal. Berlakunya asas kebebasan berkontrak dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu :

- a. Semakin berpengaruhnya ajaran itikad baik di mana itikad baik tidak hanya ada pada pelaksanaan perjanjian, tetapi juga harus ada pada saat dibuatnya perjanjian
- b. Semakin berkembangnya ajaran penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden* atau *undue influence*)¹⁶⁰

Setiawan dalam Agus Yudha Hernoko menyatakan bahwa pembatasan kebebasan berkontrak dipengaruhi oleh :

- a. Berkembangnya doktrin itikad baik

¹⁶⁰ Agus Yudha Hernoko, *Op. cit.*, halaman 99.

- b. Berkembangnya doktrin peyalahgunaan keadaan
- c. Makin banyaknya kontrak baku
- d. Berkembangnya hukum ekonomi¹⁶¹

Purwahid Patrik dalam Agus Yudho Hernoko menyatakan bahwa terjadinya berbagai pembatasan kebebasan berkontrak disebabkan oleh :

- a. Berkembangnya ekonomi yang membentuk persekutuan-persekutuan dagang, badan-badan hukum atau perseroan-perseroan, dan golongan-golongan masyarakat lain (misal : golongan buruh dan tani)
- b. Terjadinya pemasyarakatan (*vermaatschappelijking*) keinginan adanya keseimbangan antar individu dan masyarakat yang tertuju kepada keadilan sosial
- c. Timbulnya formalisme perjanjian
- d. Makin banyak peraturan di bidang hukum tata usaha negara¹⁶²

Sri Soedewi Maschoen Sofwan dalam Agus Yudha Hernoko memberikan pendapatnya tentang terjadinya pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak adalah adanya :

- a. Perkembangan masyarakat di bidang sosial ekonomi (misal : karena adanya penggabungan atau sentralisasi perusahaan)
- b. Adanya campur tangan pemerintah untuk melindungi kepentingan umum atau pihak yang lemah

¹⁶¹ *Ibid.* .

¹⁶² *Ibid.* .

- c. Adanya aliran dalam masyarakat yang menginginkan adanya kesejahteraan sosial.¹⁶³

Penulis berpendapat mengenai pelaksanaan asas kebebasan berkontrak adalah dipengaruhi oleh pelaksanaan suatu perjanjian itu sendiri. Apabila suatu perjanjian sudah dapat dilaksanakan dengan memenuhi syarat sah berlakunya suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut dapat berlaku sebagai perjanjian yang mengikat seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, dengan mengingat ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, yaitu :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Pembatasan terhadap pelaksanaan asas kebebasan berkontrak dengan dipenuhinya syarat sahnya suatu perjanjian di dalam pasal 1320 KUHPerdara, dapat penulis temukan di dalam pelaksanaan perjanjian pada koperasi, yaitu :

- a. Sepakat mereka yang telah mengikatkan dirinya

Para pihak di dalam perjanjian kredit adalah mereka yang telah mempunyai kehendak/kemauan bebas saling mengikatkan diri untuk melakukan kerjasama di bidang permodalan, dimana koperasi sebagai kreditor sepakat untuk memberikan pinjaman kepada debitor dan debitor sepakat untuk menerima pinjaman

¹⁶³ *Ibid.*, halaman 100.

dari kreditor dan akan melaksanakan semua kewajiban debitor terhadap kreditor sebagaimana yang telah disepakati bersama di dalam perjanjian. Debitor koperasi di dalam membuat perjanjian tanpa adanya paksaan, kekhilafan, maupun penipuan. Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa perjanjian kredit dilaksanakan dengan kesepakatan para pihak dan tanpa adanya cacat kehendak di dalam Pasal 1321 KUHPerdara.

b. Kreditor dan debitor cakap untuk membuat perikatan

Para pihak di dalam perjanjian kredit merupakan para pihak yang mempunyai kecakapan, yaitu kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Para pihak di dalam perjanjian kredit adalah mereka yang mampu dan wenang melakukan perbuatan hukum dan telah dewasa yaitu berumur 21(dua puluh satu) tahun atau sudah menikah

c. Adanya suatu hal tertentu

Perjanjian kredit dilakukan karena adanya suatu hal tertentu berupa objek perjanjian dalam bentuk prestasi dan kontraprestasi para pihak, yaitu pinjaman dalam bentuk uang, dengan kreditor memberikan pinjaman kepada debitor dan debitor membayar kembali pinjaman disertai dengan pembayaran imbalan/bunga kepada kreditor

d. Perjanjian kredit dilakukan dengan sebab yang halal

Perjanjian kredit dilakukan dengan sebab untuk memberikan bantuan modal kepada debitor dengan mendapatkan imbalan/bunga dari pinjaman yang diberikan.

Pembatasan berlakunya asas kebebasan berkontrak dengan terpenuhinya semua syarat sah untuk terjadinya suatu perjanjian, menurut penulis menjadikan perjanjian tersebut sah, dalam artian perjanjian tersebut tidak batal dan tidak dapat dibatalkan, karena perjanjian tersebut sudah memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif untuk terjadinya suatu perjanjian. Perjanjian kredit yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, dalam pengertian tersebut maka perjanjian kredit mengikat para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing.

Penulis berpendapat bahwa dengan terjadinya perjanjian kredit, berupa penandatanganan perjanjian kredit oleh para pihak, maka dapat diasumsikan bahwa para pihak di dalam perjanjian sudah mengerti dan memahami bentuk dan isi perjanjian beserta akibat hukum yang menyertainya. Dengan terjadinya perjanjian maka pihak debitor dianggap sebagai pihak yang telah menyetujui bentuk perjanjian, meskipun bentuk dan isi perjanjian dibuat dan dipersiapkan secara sepihak oleh koperasi. Persetujuan debitor terhadap bentuk dan isi perjanjian mengandung makna bahwa tidak terdapatnya unsur penyalahgunaan keadaan koperasi terhadap

debitor untuk membuat perjanjian kredit, sehingga asas kebebasan berkontrak meskipun belum dapat dilaksanakan secara sempurna, tidak menjadikan perjanjian tersebut tidak sah. Perjanjian kredit adalah perjanjian yang sah berdasarkan kebiasaan yang berlaku di lingkungan koperasi dengan terpenuhinya syarat sah suatu perjanjian beserta itikad baik para pihak untuk membuat dan melaksanakan perjanjian sebagaimana yang telah disepakati para pihak.

B. Penyelesaian Permasalahan Terhadap Terjadinya Wanprestasi Debitor Koperasi Nusa Indah Kendal

Pelaksanaan perjanjian dimungkinkan suatu keadaan dimana salah satu pihak tidak memenuhi perikatan yang telah disepakati atau melakukan ingkar janji, sehingga tujuan para pihak mengadakan perjanjian tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan. Ingkar janji dapat terjadi baik karena kesalahan debitor atau yang disebut ingkar janji karena lalai (*Wanprestasi*) maupun bukan karena kesalahan debitor tetapi karena suatu keadaan memaksa (*force majeure/Overmacht*).

Berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap Koperasi Nusa Indah Kendal dan debitornya, bahwa di dalam pelaksanaan perjanjian kredit juga terdapat peristiwa dimana salah satu pihak dalam perjanjian, ada yang tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan, dan mengakibatkan tidak terpenuhinya tujuan pembuatan perjanjian oleh

para pihak sebagaimana yang diperjanjikan, sehingga perlu adanya tindakan untuk menciptakan suatu keadilan.

Di dalam *wanprestasi*, seorang debitor tidak melaksanakan perjanjian adalah karena kesalahannya. *Wanprestasi* seorang debitor dapat berupa :

- a. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi untuk dilaksanakan/sama sekali tidak memenuhi perikatan
- b. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, namun tidak sebagaimana mestinya atau debitor keliru dalam memenuhi prestasi
- c. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi terlambat.¹⁶⁴

Akibat hukum bagi seorang debitor yang *wanprestasi* dapat berupa membayar kerugian kreditor atau yang disebut dengan membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian, peralihan risiko, dan dapat juga dengan membayar biaya perkara apabila sampai diperkarakan ke pengadilan.¹⁶⁵

Koperasi menerangkan bahwa sering sekali terjadi suatu tindakan ingkar janji/*Wanprestasi* dari debitor dalam bentuk :

- a. Debitor sama sekali tidak melakukan angsuran pembayaran
- b. Debitor terlambat di dalam membayar angsuran pembayaran.¹⁶⁶

Peristiwa tersebut merupakan risiko koperasi sebagai penyedia dana untuk pinjaman, sehingga pihak koperasi sudah melakukan tindakan antisipasi timbulnya permasalahan ingkar janji beserta

¹⁶⁴ H. Mashudi dan Mohammad Chidir Ali, *Op. cit.*, halaman 64.

¹⁶⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian, Op. cit.*, halaman 45.

¹⁶⁶ Ibu Setiyawati, *Loc. cit.* .

penyelesaiannya dengan menuangkan secara jelas di dalam perjanjian kredit, yang diberitahukan kepada debitor sebelum dilakukannya penandatanganan perjanjian.

Koperasi merumuskan ketentuan tentang penyelesaian ingkar janji/*Wanprestasi* di dalam Pasal 5 dan Pasal 9 dari Perjanjian Kredit, yaitu :

- a. Apabila debitor tidak membayar kewajibanya berupa keterlambatan pembayaran yaitu pembayaran tidak tepat waktu sebagaimana yang telah disepakati di dalam perjanjian kredit, maka debitor wajib membayar denda (*Pinalty Overdoe*) yang besarnya ditentukan kreditor
- b. Apabila debitor tidak membayar kembali hutangnya pada saat berakhirnya perjanjian, maka koperasi berhak mengambil pelunasan pinjaman dari penjualan jaminan secara di muka umum maupun secara di bawah tangan dan apabila masih kurang maka debitor tetap berkewajiban membayar kekurangan pembayaran, sedangkan apabila sisa, maka kreditor berkewajiban mengembalikan sisa penjualan jaminan tersebut.¹⁶⁷

Debitor koperasi mengakui pernah melakukan keterlambatan pembayaran angsuran pinjaman dan kepadanya diberikan kewajiban membayar biaya keterlambatan pembayaran atau yang disebut denda. Debitor merasa tidak keberatan dengan

¹⁶⁷ *Ibid.* .

tindakan koperasi yang memberikan denda atas keterlambatan pembayaran tersebut, karena selain debitor sudah menyetujui pembayaran denda atas keterlambatan pembayaran yang dilakukannya di dalam perjanjian kredit, debitor mengakui bahwa denda tersebut adalah sesuai dengan kesalahannya sendiri yang tidak tepat waktu di dalam membayar angsuran pembayaran.¹⁶⁸

Penulis berpendapat bahwa tindakan *wanprestasi* debitor berupa keterlambatan pembayaran maupun debitor sama sekali tidak melakukan pembayaran atau debitor sama sekali tidak berprestasi yang dilakukan karena kesalahan debitor merupakan tindakan wajar sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan dilakukannya permintaan ganti rugi koperasi kepada debitor atau dilakukan penjualan jaminan. Tindakan kreditor tersebut adalah telah sesuai dengan akibat hukum *wanprestasi*, yaitu kreditor dapat meminta ganti rugi (*scadevergoeding*) atas ongkos, rugi, dan bunga. Ongkos/biaya merupakan segala pengeluaran yang telah dikeluarkan oleh satu pihak. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditor yang diakibatkan oleh kelalaian debitor. Sedangkan bunga merupakan kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang seharusnya diperoleh kreditor.¹⁶⁹

¹⁶⁸ Bapak AW., Ibu M., Bapak BL., *Loc. cit.* .

¹⁶⁹ Subekti, Hukum Perjanjian, *Op. cit.*, halaman 47.

Koperasi mengambil langkah kekeluargaan dan kerjasama di dalam penyelesaian *wanprestasi* debitor. Koperasi memberikan peringatan terhadap debitor yang satu kali saja melakukan keterlambatan, dan kepada debitor dikenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran tersebut. Kreditor di dalam melakukan eksekusi terhadap jaminan debitor yang telah melakukan wanprestasi berupa tidak melakukan pembayaran tiga kali berturut-turut, dilakukan dalam jangka waktu tiga bulan, dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Pemberitahuan kreditor kepada debitor dengan peringatan pertama tentang terjadinya keterlambatan pembayaran dalam jangka waktu satu bulan pertama
- b. Peringatan kedua tentang tidak berprestasinya sama sekali debitor dalam jangka waktu satu bulan kedua
- c. Peringatan ketiga tentang tidak berprestasinya sama sekali debitor dalam jangka waktu satu bulan ketiga, yang mengandung makna bahwa debitor telah melakukan tindakan tiga kali berturut-turut tidak melakukan pembayaran angsuran beserta kewajibannya¹⁷⁰

Debitor yang sudah diberikan pernyataan lalai, baru kemudian dilakukan peringatan, agar debitor melaksanakan

¹⁷⁰ Ibu Setiyawati, *Loc. cit.* .

kewajibannya dilakukan Koperasi Nusa Indah Kendal melalui tindakan :

- a. Terhadap peringatan pertama yang kemudian disertai pemenuhan kewajiban debitor kepada kreditor, berupa keterlambatan pembayaran, maka kreditor akan memberikan denda keterlambatan pembayaran
- b. Peringatan kedua diberikan kepada debitor batas waktu pembayaran, namun apabila debitor tetap tidak memenuhi kewajibannya, maka koperasi akan menarik jaminan yang diberikan debitor. Setelah jaminan berada di bawah kekuasaan koperasi, maka debitor diberikan batas waktu lagi untuk melakukan pembayaran.
- c. Peringatan ketiga diberikan koperasi terhadap debitor apabila dalam jangka waktu kedua yang telah diberikan koperasi terhadap debitor tidak terdapat itikad baik dari debitor untuk melaksanakan pembayaran sebagaimana yang telah diperjanjikan, maka sampailah pada waktu debitor selama tiga kali berturut-turut tidak memenuhi pembayaran, maka kreditor akan melakukan eksekusi terhadap jaminan debitor. Jaminan dieksekusi kreditor untuk diambil sejumlah pinjaman yang telah diterima debitor beserta kewajibannya dan sisanya dikembalikan kepada debitor.¹⁷¹

¹⁷¹ *Ibid.* .

Penulis berpendapat bahwa koperasi dalam meminta denda atas keterlambatan pembayaran dari debitor adalah tidak dengan sendirinya timbul pada saat kelalaian terjadi, tetapi karena adanya pernyataan lalai koperasi kepada debitor berdasarkan kekuatan perjanjian itu sendiri. Perjanjian kredit telah menetapkan di dalam perjanjian yang disepakati kedua belah pihak, bahwa debitor telah dianggap bersalah jika satu kali saja dia melewati batas waktu yang diperjanjikan dan atau jika teguran kelalaian sudah dilakukan, baru kemudian dilakukan peringatan (*somasi/aanmaning*), yaitu debitor agar melaksanakan kewajibannya sesuai teguran/ Pernyataan lalai dari koperasi. Apabila keterlambatan terjadi satu kali, maka debitor berkewajiban membayar denda keterlambatan. Apabila keterlambatan dilakukan selama tiga kali berturut-turut, maka akan dilakukan penjualan jaminan untuk pelunasan pinjaman beserta kewajiban yang menyertainya.

Koperasi melakukan penjualan jaminan secara di bawah tangan¹⁷², menurut penulis tindakan koperasi tersebut dapat dibenarkan, karena terhadap jaminan berupa tanah dan atau bangunan di atasnya telah dilakukan pengikatan jaminan dengan pembebanan Hak Tanggungan, dan terhadap jaminan yang dibebani Jaminan Fidusia berupa benda bergerak dan benda tidak

¹⁷² *Ibid.* .

bergerak berupa bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan, jika terjadi *wanprestasi* oleh debitor maka kreditor dapat melakukan eksekusi terhadap jaminan dengan berdasarkan titel eksekutorial Sertifikat Hak Tanggungan maupun titel eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia. Penjualan secara di bawah tangan dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima jaminan, apabila dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Penjualan jaminan secara di bawah tangan terhadap obyek Hak Tanggungan dan obyek Jaminan Fidusia dapat dilaksanakan, karena berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan ketentuan pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyebutkan bahwa penjualan jaminan di luar lelang/di bawah tangan dapat dilakukan dengan syarat :

1. Ada kesepakatan antara kreditor dan debitor
2. Dilakukan dalam jangka waktu satu bulan setelah kreditor atau debitor memberitahukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Perhitungan satu bulan dihitung sejak tanggal pengiriman pos tercatat atau tanggal penerimaan faksimil
3. Diumumkan melalui sedikitnya dua surat kabar yang beredar di suatu tempat atau surat kabar yang beredar di daerah yang

bersangkutan. Pengumuman juga dapat dilakukan melalui radio dan televisi

4. Tidak ada keberatan dari pihak lain

Syarat-syarat tersebut perlu dipenuhi untuk tercapainya penyelesaian pembayaran pinjaman yang saling menguntungkan bagi para pihak di dalam perjanjian.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan sebagai berikut :

Pelaksanaan perjanjian pinjaman uang pada Koperasi Nusa Indah Kendal yang merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pembayaran sejumlah imbalan.

1. Pelaksanaan asas kebebasan berkontrak di dalam perjanjian pinjaman uang pada Koperasi Nusa Indah Kendal belum dapat

dilaksanakan secara sempurna. Perjanjian pinjaman uang pada Koperasi Nusa Indah Kendal dibuat dengan judul Perjanjian Kredit. Perjanjian Kredit pada Koperasi Nusa Indah Kendal merupakan perjanjian baku, yaitu perjanjian yang telah dipersiapkan terlebih dahulu dan isinya sudah ditetapkan secara sepihak dalam bentuk formulir oleh Pihak Koperasi. Debitor tidak diberikan kesempatan untuk merundingkan isi Perjanjian Kredit tersebut, namun kepada debitor masih diberikan kesempatan untuk merundingkan bagian dari isi perjanjian yang menyangkut jumlah pinjaman, jumlah bunga, jaminan dan tata cara pembayaran. Debitor dalam hal ini tidak mempunyai pilihan lain kecuali menerima isi Perjanjian Kredit dalam artian debitor menerima pinjaman dari koperasi atau debitor menolak isi perjanjian yang berarti debitor tidak mendapatkan pinjaman dari koperasi. Keadaan debitor tersebut dikenal dengan istilah *take it or leave it* kontrak. Pelaksanaan asas kebebasan berkontrak di dalam Perjanjian Kredit belum dapat dilaksanakan secara sempurna karena belum dilaksanakannya unsur asas kebebasan berkontrak berupa kebebasan para pihak menentukan bentuk perjanjian, yaitu bentuk perjanjian di dalam Perjanjian Kredit merupakan perjanjian baku sepihak yang bertentangan dengan kebebasan para pihak menentukan bentuk perjanjian. Meskipun asas kebebasan berkontrak belum dapat dilaksanakan secara sempurna, namun tidak menjadikan perjanjian tersebut batal atau

dapat dibatalkan, karena perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang sudah berlaku berdasarkan kebiasaan di lingkungan koperasi dan perjanjian tersebut sudah memenuhi syarat syahnya perjanjian di dalam Pasal 1320 KUHPerdara, berupa terpenuhinya unsur kesepakatan para pihak, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal.

2. Penyelesaian permasalahan dalam hal debitor Koperasi Nusa Indah Kendal melakukan *wanprestasi* di dalam perjanjian pinjaman uang dengan memberikan denda kepada debitor yang melakukan *wanprestasi* berupa terlambat membayar angsuran dan menjual jaminan apabila debitor *wanprestasi* dengan sama sekali tidak membayar angsuran, adalah telah sesuai dengan pelaksanaan akibat hukum *wanprestasi* di dalam Pasal 1246 KUHPerdara. Akibat hukum *wanprestasi* di dalam Pasal 1246 KUHPerdara berupa :
 - a. Pemenuhan perikatan (*nakomen*)
 - b. Pemutusan perikatan, jika perjanjiannya timbal balik maka berhak menuntut pembatalan perikatan (*ontbinding*)
 - c. Ganti rugi (*scadevergoeding*)
 - d. Pemenuhan perikatan dan ganti rugi
 - e. Pemutusan/pembatalan perikatan dan ganti rugi.

B. Saran

1. Pelaksanaan asas kebebasan berkontrak di dalam perjanjian pinjaman uang pada Koperasi Nusa Indah Kendal yang dibuat secara baku sepihak, karena dengan alasan kecepatan dan ketepatan pelayanan nasabah, sebaiknya lebih memperhatikan hak atau kepentingan debitor sebagai pihak di dalam perjanjian, dengan merumuskan klausula perjanjian yang lebih sesuai dengan kebiasaan di lingkungan koperasi dan dunia lembaga keuangan, sesuai dengan itikad baik para pihak di dalam perjanjian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, misalnya perjanjian pinjaman uang pada Koperasi Nusa Indah Kendal yang berjudul Perjanjian Kredit sebaiknya menggunakan judul Perjanjian Pinjaman Uang, meskipun di dalam klausulnya juga menggunakan istilah kredit dan pinjaman secara bersamaan dengan pendapat kedua istilah tersebut sama, karena koperasi tidak mengenal istilah kredit, koperasi hanya mengenal istilah pinjaman dan istilah kredit adalah istilah yang digunakan di dunia perbankan. Pinjaman di dalam koperasi yang bersifat kekeluargaan tidak mengenal bunga tetapi hanya berupa imbalan dari debitor, sedangkan di dalam kredit yang bersifat komersial menarik bunga terhadap piutang yang diberikan. Dengan demikian istilah bunga yang digunakan di dalam Perjanjian Kredit Koperasi Nusa Indah Kendal sebaiknya juga diganti dengan istilah imbalan, agar lebih sesuai dengan sifat

kekeluargaan koperasi, dan tercapai tujuan pendirian koperasi untuk mencapai kesejahteraan anggota.

2. Penyelesaian permasalahan apabila terjadi *wanprestasi* debitor sebaiknya dirumuskan secara jelas di dalam perjanjian, yaitu jumlah ganti rugi dicantumkan di dalam perjanjian dan dirundingkan terlebih dahulu dengan debitor, sehingga tidak menimbulkan permasalahan debitor merasa keberatan dengan akibat hukum *wanprestasi*, baik mengenai jumlah denda maupun tentang eksekusi jaminan terhadap debitor yang sama sekali tidak berprestasi. Pencantuman akibat hukum *wanprestasi* secara jelas dengan dirundingkan secara baik dengan tercapai kesepakatan dengan debitor sebaiknya dilakukan agar debitor tidak merasa dirugikan dengan akibat hukum *wanprestasi* yang diberikan oleh kreditor, untuk menghindari keberatan dari debitor dan pelaksanaan eksekusi yang cepat dan damai.